



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. LAKIP ini disusun sebagai implementasi dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai media untuk menyampaikan informasi mengenai capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Laporan ini memuat gambaran mengenai perencanaan kinerja, capaian indikator kinerja, analisis keberhasilan dan kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor pada masa yang akan datang. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan mengenai kinerja organisasi serta menjadi bahan evaluasi dalam perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Bogor, 16 Februari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh : INSPEKTUR DAERAH, DRS. IRWAN RIYANTO, M.Si. Pembina Utama Muda
---	---



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. LAKIP menjadi alat untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Di Inspektorat Daerah Kota Bogor, penyusunan LAKIP dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi yang diemban sebagai unit pengendali intern pemerintah daerah. Inspektorat Daerah Kota Bogor bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah di Kota Bogor.

Penyusunan LAKIP dilakukan sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. LAKIP juga menjadi alat untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Dalam penyusunan LAKIP, Inspektorat Daerah Kota Bogor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan melibatkan seluruh unit kerja di instansi pemerintah dan melalui proses yang sistematis dan terstruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) di Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah untuk memenuhi kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada



publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah di Kota Bogor.

Tujuan penyusunan LAKIP di Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja instansi pemerintah kepada publik, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah.
- 2) Memotivasi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- 3) Menyediakan alat pengukuran kinerja dan evaluasi untuk instansi pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
- 4) Menyediakan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja instansi pemerintah, serta memfasilitasi dialog antara instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan publik.
- 5) Dengan penyusunan LAKIP yang baik dan terstruktur, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pemantauan kinerja instansi pemerintah di Kota Bogor.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor menyelenggarakan fungsi:

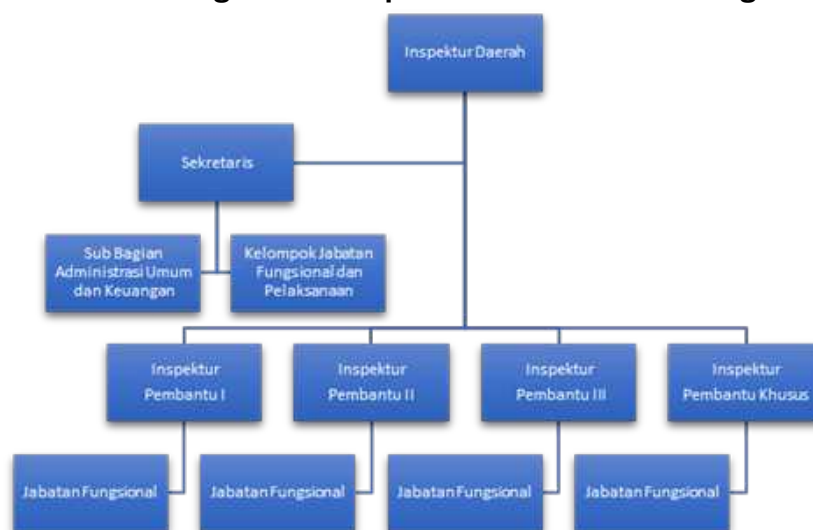
- a. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan;



- b. pelaksanaan pengawasan internal meliputi kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, kegiatan asistensi/pendampingan, kegiatan reviu, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pemeriksaan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. pengawasan program reformasi birokrasi;
- e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
- f. pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana, dan prasarana Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor



Sumber : Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022



Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksanaan;
3. Inspektur Pembantu I membawahi Jabatan Fungsional;
4. Inspektur Pembantu II membawahi Jabatan Fungsional;
5. Inspektur Pembantu III membawahi Jabatan Fungsional;
6. Inspektur Pembantu Khusus membawahi jabatan Fungsional.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat Daerah Kota Bogor memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Inspektorat Daerah tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis perangkat daerah dalam mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja, pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

Sebagai bagian dari sistem pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kota Bogor memiliki posisi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, konsultasi, serta evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah. Peran ini menjadi semakin strategis seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



Selain itu, Inspektorat Daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan nasional di bidang pengawasan dan reformasi birokrasi, seperti penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas APIP, pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui kegiatan pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan, serta pendampingan kepada perangkat daerah, Inspektorat Daerah berperan dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, penyusunan perencanaan Tahun 2025 tidak lagi mengacu pada dokumen RPJMD 2019-2024 karena masa jabatan kepala daerah sebelumnya telah berakhir dan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah untuk periode transisi diakomodir melalui Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025–2026, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah termasuk Inspektorat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah selama masa transisi pemerintahan.

Dengan adanya dokumen RPD tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor tetap menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kualitas pengendalian intern, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Selain itu, Inspektorat Daerah juga terus melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengawasan melalui peningkatan kompetensi auditor, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

Melalui berbagai upaya tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung tercapainya tujuan



pembangunan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Inspektorat Daerah Kota Bogor dihadapkan pada berbagai tantangan strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal.

Selain itu, perkembangan kebijakan nasional di bidang pengawasan, reformasi birokrasi, serta penguatan akuntabilitas kinerja juga menuntut Inspektorat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan, kapasitas kelembagaan, serta kompetensi sumber daya manusia pengawasan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa peran APIP tidak hanya berfokus pada pengawasan kepatuhan (compliance), tetapi juga mampu memberikan nilai tambah (value added) dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, serta dengan memperhatikan kondisi internal organisasi dan lingkungan strategis eksternal, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pengawasan ke depan. Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, strategi, serta prioritas program pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor. Berikut beberapa Isu strategis dimaksud dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor

Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Sasaran	Strategi
Belum optimalnya pengawasan internal dilingkungan	Meningkatkan profesionalisme APIP	Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka	Mengoptimalkan pengelolaan SDM, struktur, dan tata kelola



Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Sasaran	Strategi
Pemerintah Daerah Kota Bogor		mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan	APIP
			Meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas, manajemen kinerja, dan praktik profesional APIP
			Melaksanakan evaluasi maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala
			Menerapkan manajemen risiko dalam perencanaan
			Mengoptimalkan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja	Melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja
			Meningkatkan komitmen, baik kepala maupun staf Unit Kerja dalam melakukan pembangunan zona integritas yang efektif
	Optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja keuangan



Permasalahan Pokok	Isu Strategis	Sasaran	Strategi
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	perangkat daerah Mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat Daerah Kota Bogor menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan organisasi. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan isu strategis organisasi serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor selanjutnya dapat diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan	Mengoptimalkan pengelolaan SDM, struktur, dan tata kelola APIP	1. Mengikuti diklat dan pelatihan keahlian dengan tertentu instansi pembina, baik internal maupun eksternal 2. Menyediakan SDM sesuai kebutuhan
		Meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas, manajemen kinerja, dan praktik profesional APIP	3. Meningkatkan In House Training/ Pelatihan Kantor Sendiri 4. Update peraturan perundang-undangan yang berlaku



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Melaksanakan evaluasi maturitas SPIP pada perangkat daerah secara berkala	Melaksanakan evaluasi maturitas SPIP secara rutin dan mencakup seluruh perangkat daerah
		Menerapkan manajemen risiko dalam perencanaan	Melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan kebijakan terbaru
		Mengoptimalkan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi	1. Memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan Anjab ABK 2. Melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja keuangan perangkat daerah	Melakukan pendampingan perangkat daerah atas tindak lanjut temuan
Terciptanya Kinerja Organisasi Bebas Korupsi dan Birokrasi bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja	Melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja	1. Meningkatkan Frekuensi pendampingan dan Asistensi pembangunan zona integritas secara rutin dan mencakup seluruh unit kerja
		Meningkatkan komitmen, baik kepala maupun staf Unit Kerja dalam melakukan pembangunan zona integritas yang efektif	2. Melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama stakeholder 3. Menyusun mitigasi risiko atas potensi penyimpangan secara komprehensif
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Mengoptimalkan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas Sistem Informasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

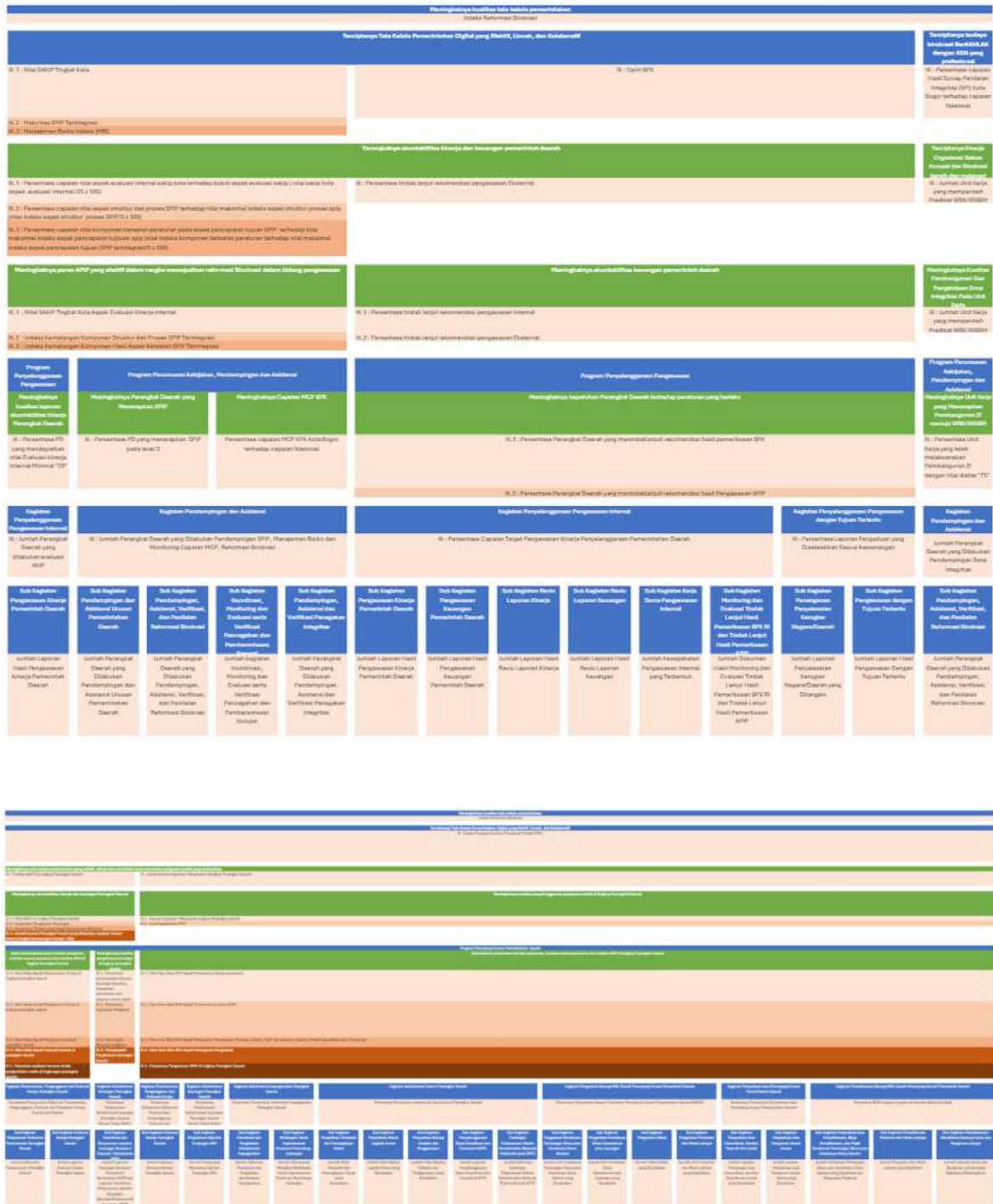
Sumber : Dokumen Renstra Inspektorat 2025-2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



1.5. Cascading Inspektorat Daerah Kota Bogor



1.6. Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Bogor

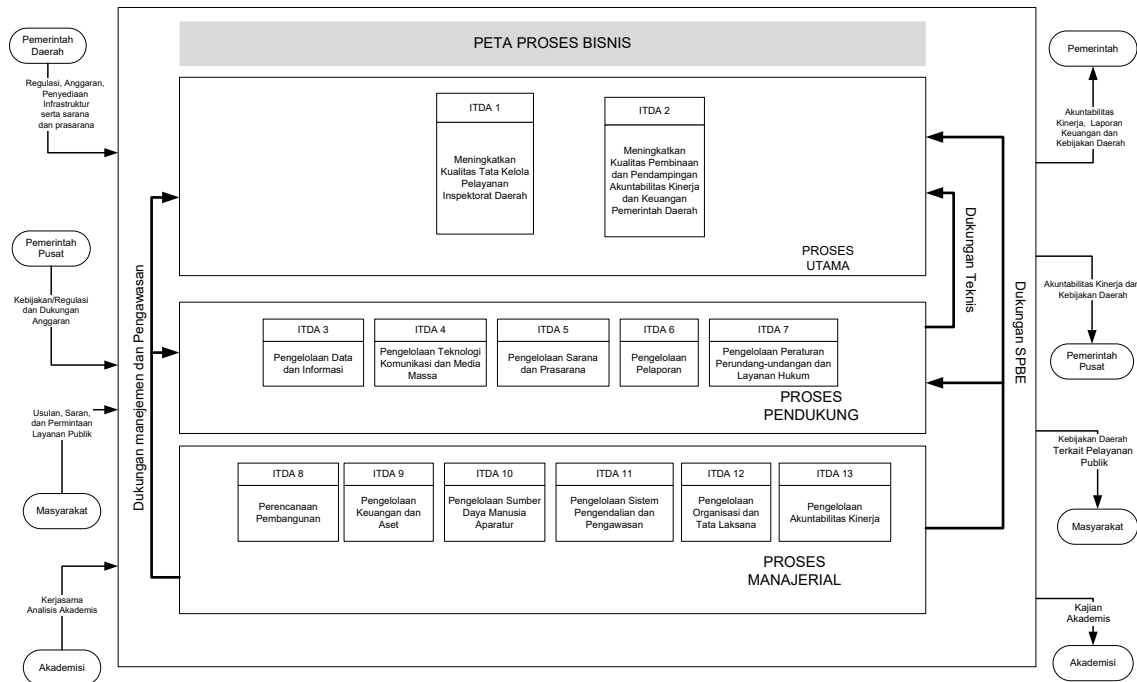
Berdasarkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor 700.45-27 ITDA Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Inspektur Daerah Kota Bogor, berikut ini merupakan Peta Proses Bisnis pada Inspektur Kota Bogor :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Bogor



1.7. Sistematika Laporan

Sistematika laporan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi
- 1.5 Sistematika Laporan

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2023
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Realisasi Indikator Utama

3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tujuan Tahun 2023

3.2 Analisis Pengukuran Kinerja

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

3.4 Analisis Program/Kegiatan

BAB IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar inline dengan rencana Pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka Panjang dan menengah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2025

Perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah dapat berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Perencanaan strategis ini menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan guna mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, perencanaan Tahun 2025 tidak lagi mengacu pada dokumen RPJMD karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelumnya serta adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode transisi diakomodir melalui Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025–2026, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan selama masa transisi pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor menyusun perencanaan strategis dengan memperhatikan tugas dan fungsi pengawasan, isu strategis organisasi, serta kebijakan nasional di bidang pengawasan dan reformasi birokrasi. Perencanaan ini juga diarahkan untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam meningkatkan kualitas pengawasan, mendorong penerapan



akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Pembangunan, isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor serta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, yaitu :

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang mengacu terhadap isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Inspektorat Daerah Kota Bogor diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2026. Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah. Kesesuaian Tujuan dan Sasaran renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Daerah Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

Tabel 2.1
Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor
Tahun 2025-2026

NO	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET		RUMUS
				2023	2025	2026	
1	Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan	Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal	Nilai	16.94	17.8	18.66	Bobot Evaluasi Internal 25%
		Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi	Indeks	2.912	2.948	2.973	Jumlah bobot nilai komponen struktur dan proses
		Indeks Kematangan Komponen Hasil Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi	Indeks	1.000	1.000	1.000	Jumlah bobot nilai temuan Ketaatan
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	Persen	86.96	90	92	(Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan / Total Rekomendasi Pengawasan) X 100
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persen	90.2	90.2	90.2	(Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan / Total Rekomendasi Pengawasan) X 100
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	4	5	6	Unit kerja diusulkan yang sudah memiliki predikat ZI oleh Pemerintah Kota Bogor melalui SK
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90,58	90,58	90,58	Berdasarkan Total Bobot Komponen yang dinilai pada Tingkat Kota
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan			95	95	Formulasi Belum tersedia dari Bapperida



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

NO	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET		RUMUS
				2023	2025	2026	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita	Persen	91	91	92	(jumlah Tindak lanjut pemeriksaan /total temuan pemeriksaan) X 100
		Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	N/A	1	1	Jumlah Inovasi
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	3.414	3.536	3.592	Nilai 9 Unsur Pelayanan Responden
		Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

Sumber : Dokumen Renstra Inspektorat 2025-2026

C. Program dan Indikator Kinerja Program

Tujuan dan sasaran tidak akan tercapai apabila program yang disusun tidak inline atau berkaitan dengan maksud dibentuknya tujuan dan sasaran. Adapun target kinerja program Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3	Persen	90
	Nilai Capaian MCP KPK diatas rata rata Nasional	Persen	87
	Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"	Persen	10
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal "20"	Persen	70.63



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET
	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persen	90.2
	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan APIP	Persen	90
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Nilai	87.11
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	88.75
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Nilai	88.38
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	88.38
	Persentase Pengelolaan BMD di Lingkup Perangkat Daerah	Persen	94.00
	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	Nilai	28.16
	Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	Nilai	27.78
	Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja di perangkat daerah	Nilai	13.03
	Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	Nilai	21.70
	persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	Persen	100.00
	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	Persen	100.00
	Persentase Kepatuhan Anggaran	Persen	100.00
	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	Persen	> = 95
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	94.00

Sumber : Renstra Inspektorat 2025-2026

D. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2025 meliputi pelaksanaan 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.684.931.353,- (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dengan capaian sebesar 96,64 persen atau sebesar Rp. 25.789.260.060,- (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu enam puluh rupiah) Rencana Kinerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Bogor diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Zona Integritas	Perangkat Daerah	10
Program Penyelenggaraan Pengawasan			
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP	Perangkat Daerah	36
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengaduan yang Diselesaikan Sesuai Kewenangan	Persen	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	Persen	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	Persen	100
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	Persen	90
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik	Persen	100
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah</i>	Persen	<i>100</i>
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi</i>	Persen	<i>100</i>

Sumber : Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2025-2026

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bogor. Adapun target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk Tahun 2025 dilampirkan dalam table 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
			2025
1	Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal	Nilai	17.8
2	Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi	Indeks	2.948
3	Indeks Kematangan Komponen Hasil Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi	Indeks	1.000
4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	Persen	90



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
			2025
5	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persen	90.2
6	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	5
7	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90,58
8	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan		95
9	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persen	91
10	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	1
11	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	3.536
12	Level Kapabilitas APIP	Level	3

Sumber : Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2025-2026.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Wali Kota Bogor. Realisasi capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun 2025, sebagai berikut :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
				2025
1	Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan	Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal	Nilai	17.8
		Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi	Indeks	2.948
		Indeks Kematangan Komponen Hasil Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi	Indeks	1.000
2	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	Persen	90
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persen	90.2
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	5
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90,58
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan		95
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persen	91
		Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	1
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	3.536
		Level Kapabilitas APIP	Level	3



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam mencapai tujuan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor melalui “Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” didukung oleh 2 (dua) Sasaran yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah dan Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2024 sudah baik. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2025

Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal dimaksudkan sebagai alat ukuran atas tingkat kematangan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Aspek ini tidak hanya menilai keberadaan kegiatan evaluasi, tetapi juga mengukur kualitas, kedalaman analisis, konsistensi pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal dapat dilihat pada infografis sebagai berikut :



Gambar 3.1

Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024,
Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional
(Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal)



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

Berdasarkan data pada gambar 3.1, capaian indikator Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2025 dengan nilai 17,71. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat efektif dan hampir memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik, dengan selisih peningkatan sebesar 0,015. Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pada Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal di bawah ini.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal pada Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal.

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran 1 (satu) untuk Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2025, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB Nomor: B/233/AA.05/2025 Perihal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Bahwa capaian Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal Kota Bogor mencapai 98,33 persen dengan nilai 17,71 dari target nilai 18,01. Berikut dilampirkan pada Tabel 3.1 mengenai capaian Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2025.



Tabel 3.1

Capaian Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (persen) TAHUN 2025
1	Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal	Level	18,01	17,71	98,33

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap realisasi dan Capaian Tahun 2024 dijadikan salah satu tolok ukur atau sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.

Menunjukkan penjelasan mengenai perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. Penilaian pada Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal yang dilakukan oleh Kementrian PAN-RB mengalami peningkatan sebesar 0,015 poin yaitu dari realisasi Tahun 2024 dengan nilai 17,44 dan pada tahun 2025 meningkat dengan nilai 17,71. Adapun Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 pada Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal disajikan pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal	17,44	17,71	0,015	Capaian Meningkat

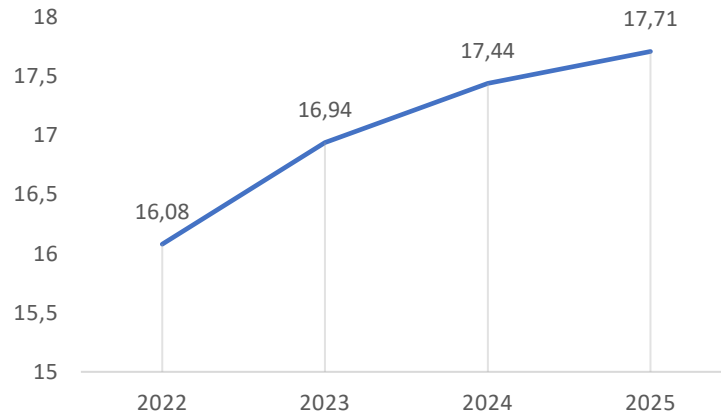
Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

Selain itu apabila melihat pencapaian pada indicator Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal dari mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami progress yang cukup baik. Berikut dilampirkan trend capaian Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 pada grafik 3.1 dibawah ini:



Grafik 3.1

Capaian Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal



Sumber : Kemenpan-RB, 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal.

Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2026, dimana harus terealisasi dengan persentase 100 persen pada tahun terakhir renstra yaitu tahun 2026. Capaian kinerja pada Indikator Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan pada target akhir Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan capaian sebesar 98,33 persen, dimana target pada akhir renstra yaitu dengan capaian nilai 18,01 dan realisasi pada tahun 2025 yaitu dengan nilai 17,71. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target 5Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra
Level Kapabilitas APIP

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAH TAHUN 2025 (persen)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAH TARGET AKHIR RENSTRA (persen)
1	Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal	17,71	98,33	18,01	98,33



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional seperti yang terlihat dalam gambar 3.5 belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB mengenai hasil rata-rata nasional Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal di tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal.

Faktor keberhasilan dalam mencapai Kinerja pada Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal yaitu di tindaklanjutinya beberapa rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya oleh Kementrian PAN-RB. Adapun tercapainya kinerja ini didukung oleh beberapa factor, sebagai berikut :

1. Membentuk Tim *Self Assesment* dan Tim *Self Improvement* Kapabilitas, yang bekerja untuk menginventarisir dan mengakomodir semua komponen/elemen pendukung peningkatan leveling tersebut.
2. Adanya pendampingan dan pembekalan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat untuk memfasilitasi kelancaran kinerja Tim *Self Assesment* dan Tim *Self Improvement* Kapabilitas.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP, melalui Diklat Pembentukan dan Diklat Substansi.
4. Merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan.

Berikut disampaikan peningkatan dari tahun sebelumnya berdasarkan tabel 3.4 Perbandingan Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal di bawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal

NO	KOMPONEN	NILAI		+/-
		2024	2025	
1	Perencanaan Kinerja	24,43	24,54	
2	Pengukuran Kinerja	24,93	25,12	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



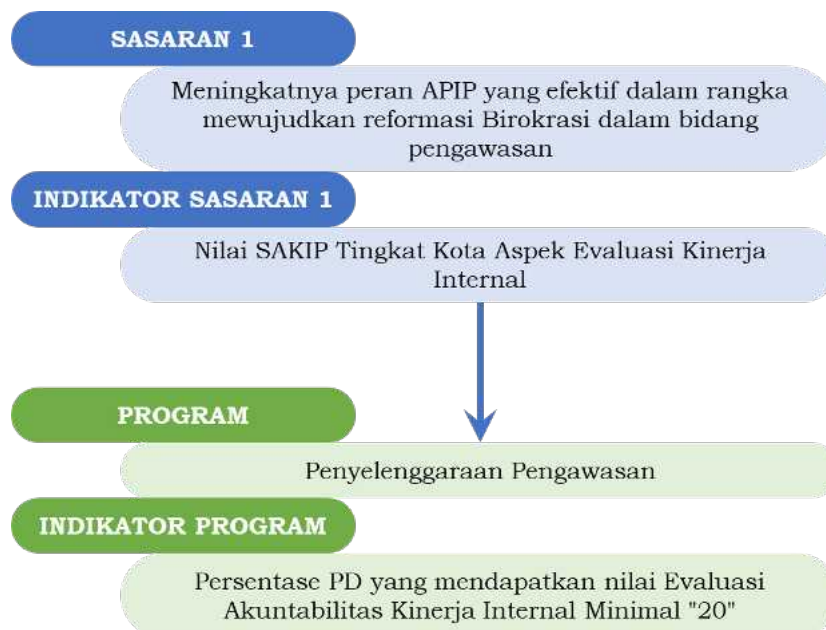
NO	KOMPONEN	NILAI		+/-
		2024	2025	
3	Pelaporan Kinerja	11,49	11,59	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,44	17,71	0,015
Nilai Hasil Evaluasi		78,29	78,96	
Tingkat Nilai Akuntabilitas		BB	BB	

Sumber : Hasil Evaluasi KemenPAN-RB, Tahun 2025

F. Program Pendukung Capaian Kinerja Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal.

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis pertama Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan yang didukung dengan 4 (empat) indikator yang salah satunya yaitu Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal yang ketercapaiannya didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal yaitu sebesar 98,33 persen yang menyimpulkan bahwa Capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.2:

Gambar 3.2
Pendukung Capaian Kinerja
Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal



G. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal telah tercapai 87,80 persen dengan efisiensi sebesar 12,20 persen atau setara dengan Rp6.701.500,-. Berikut disampaikan pada tabel 3.5 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :

Tabel 3.5
Dukungan dan Efisiensi Anggaran
Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal "20"	70,63	85,71	121,36	54.918.000,00	48.216.500,00	87,80	Efisien
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	54.918.000,00	48.216.500,00	87,80	Efisien
Total					54.918.000,00	48.216.500,00	87,80	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, secara umum pelaksanaan kegiatan menunjukkan capaian yang sangat baik serta didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien. Hal ini tercermin dari indikator Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal minimal 20, dengan target sebesar 70,63persen dan realisasi mencapai 85,71persen, atau sebesar 121,36persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada perangkat daerah telah berjalan secara optimal dan bahkan melampaui target yang direncanakan.

Selain itu, pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, indikator Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berhasil direalisasikan sebesar 100persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini



menunjukkan bahwa seluruh rencana kegiatan pengawasan kinerja dapat dilaksanakan secara penuh sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari sisi pemanfaatan anggaran, total alokasi anggaran sebesar Rp54.918.000,00 terealisasi sebesar Rp48.216.500,00 atau 87,80persen, sehingga menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan program tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya yang tersedia telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan dapat disimpulkan berhasil mencapai bahkan melampaui target kinerja yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang efisien, sehingga memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas akuntabilitas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi Tahun 2025

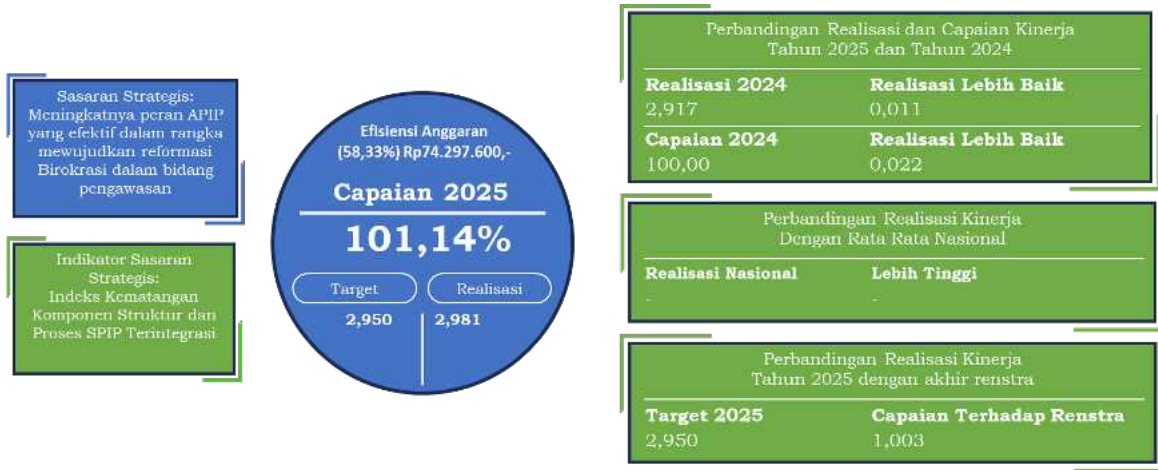
Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dimaksudkan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah, khususnya pada aspek struktur organisasi, kebijakan, serta proses pengendalian yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indeks ini menggambarkan sejauh mana mekanisme pengendalian telah disusun secara sistematis, diterapkan secara konsisten, dan terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Semakin tinggi nilai indeks yang diperoleh, maka semakin menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern telah berjalan dengan baik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Berikut Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi dapat dilihat pada gambar infografis 3.3 sebagai berikut:



Gambar 3.3

Data Capaian Kinerja Tahun 2025 , Perbandingan Dengan Tahun 2024, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional (Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi)



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

Berdasarkan data pada gambar 3.3 serta melalui surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : PE.09.03/LHP-694/PW10/3.2/2025 perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (SPIP-T) pada Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025, capaian indikator Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dengan nilai 2,981. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat efektif dan hampir memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik, dengan selisih peningkatan sebesar 0,011. Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pada Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di bawah ini.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi pada Penilaian Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi.

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 2,981 dari target yang ditetapkan sebesar 2,950, atau setara dengan 101,14persen. Capaian



tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik serta mampu melampaui target kinerja yang telah direncanakan.

Dengan capaian yang melebihi target tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan optimal, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Tahun 2025
Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (persen) TAHUN 2024
1	Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi	Nilai	2,950	2,981	101,14

Sumber : Hasil Evaluasi SPIP, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 **Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi.**

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024, realisasi kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang lebih baik. Realisasi Tahun 2024 tercatat sebesar 2,917, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 2,981, atau mengalami peningkatan sebesar 0,011.

Selain itu, dari sisi persentase capaian kinerja juga terjadi peningkatan. Pada Tahun 2024 capaian kinerja berada pada angka 100,00persen, sedangkan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 101,14persen, atau lebih tinggi sebesar 0,022. Adapun Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi disajikan pada tabel 3.7 berikut ini :



Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi	2,917	2,981	0,011	Capaian Meningkat

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2024

C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi.

Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2026, dimana harus terealisasi dengan persentase 100 persen pada tahun terakhir renstra yaitu tahun 2026. Capaian kinerja pada Indikator Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi Tahun 2025 telah melebihi target yang telah ditetapkan pada target akhir Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan capaian sebesar 100,26 persen, dimana target pada akhir renstra yaitu 2,973 dan realisasi pada tahun 2025 yaitu 2,981. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi	2,981	101,14	2,973	100,26

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan oleh BPKP Jawa



Barat mengenai hasil rata-rata nasional Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi di tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi menunjukkan capaian sebesar 101,14persen, dengan realisasi 2,981 dari target 2,950. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern pada aspek struktur organisasi dan proses pengendalian telah berjalan dengan baik serta mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang memiliki realisasi sebesar 2,917, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 0,011 serta peningkatan capaian dari 100,00persen menjadi 101,14persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan komponen pengendalian intern, khususnya pada penguatan struktur pengendalian dan penerapan proses pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

Faktor Pendukung Keberhasilan:

1. Penguatan pembinaan dan pendampingan implementasi SPIP oleh APIP kepada perangkat daerah.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan pengendalian intern.
3. Meningkatnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mendukung penerapan SPIP.
4. Penyempurnaan dokumen kebijakan, standar operasional prosedur, dan mekanisme pengendalian proses kerja.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam peningkatan indeks kematangan SPIP, antara lain:



Faktor Penghambat:

1. Perbedaan tingkat pemahaman perangkat daerah terhadap implementasi SPIP terintegrasi.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengendalian intern.
3. Belum optimalnya konsistensi penerapan prosedur pengendalian pada beberapa perangkat daerah.

Dengan demikian, penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan pengendalian intern perlu terus dilakukan agar tingkat kematangan SPIP dapat terus meningkat pada periode berikutnya.

F. Program Pendukung Capaian Kinerja Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi.

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis pertama Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan yang didukung dengan 4 (empat) indikator yang salah satunya yaitu Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi yang ketercapaiannya didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi yaitu sebesar 101,14 persen yang menyimpulkan bahwa Capaian kinerja tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.4:



Gambar 3.4
Pendukung Capaian Kinerja
Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi



G. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi telah tercapai 41,67 persen dengan efisiensi sebesar 58,33 persen atau setara dengan Rp74.297.600,-. Berikut disampaikan pada tabel 3.9 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :

Tabel 3.9
Dukungan dan Efisiensi Anggaran
Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3	90	100	113,44	127.381.600,-	53.084.000,-	41,67	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	100,00	127.381.600,-	53.084.000,-	41,67	Efisien
TOTAL					127.381.600,-	53.084.000,-	41,67	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3 berhasil melampaui target, dari target 90persen terealisasi 100persen atau sebesar 113,44persen. Selain itu, kegiatan pendampingan dan asistensi kepada 36 Perangkat Daerah juga dapat direalisasikan seluruhnya atau mencapai 100persen, sehingga menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah memperoleh pendampingan terkait implementasi SPIP, manajemen risiko, monitoring capaian MCP, dan reformasi birokrasi.

Dari sisi anggaran, alokasi sebesar Rp127.381.600,- terealisasi sebesar Rp53.084.000,- atau 41,67persen, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan efisien. Realisasi anggaran yang tidak terserap secara penuh disebabkan oleh adanya satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu Pendampingan Penilaian Mandiri melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan narasumber dari BPKP. Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian kinerja tetap dapat memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kematangan Komponen Hasil Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi Tahun 2025

Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan pengendalian intern dalam memastikan kepatuhan



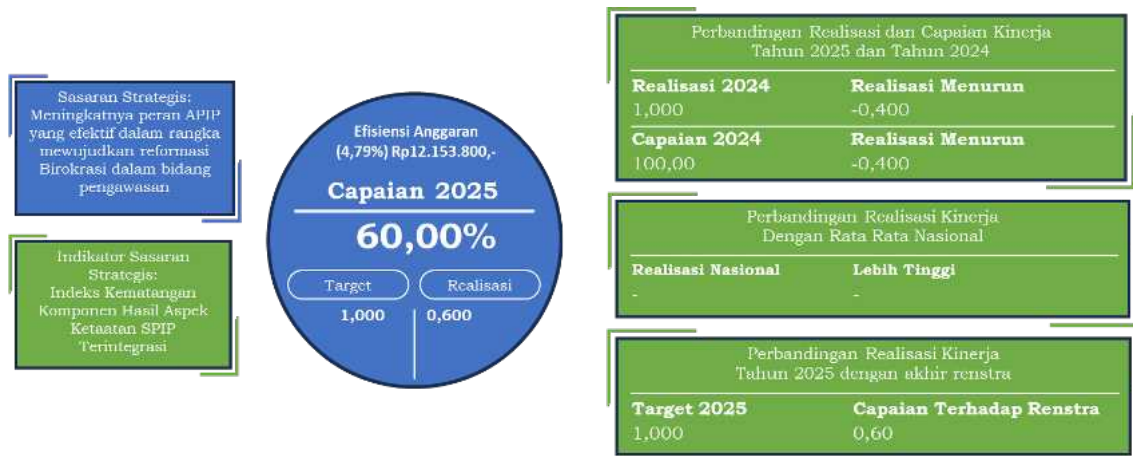
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



terhadap kebijakan, prosedur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah.

Indeks ini menggambarkan sejauh mana implementasi SPIP tidak hanya tersusun dari sisi struktur dan proses, tetapi juga telah menghasilkan ketaatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Semakin tinggi nilai indeks yang dicapai, maka menunjukkan bahwa pengendalian intern telah berjalan secara efektif dalam mendorong kepatuhan perangkat daerah, meminimalkan potensi penyimpangan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Capaian Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi dapat dilihat pada gambar infografis 3.5 sebagai berikut :

Gambar 3.5
Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional
(Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi)



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

Berdasarkan data pada gambar 3.5, capaian indikator Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dengan nilai 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat efektif dan hampir memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pada Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi di bawah ini.



A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi

Berdasarkan data pada gambar 3.5 serta melalui surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : PE.09.03/LHP-694/PW10/3.2/2025 perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (SPIP-T) pada Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025, capaian indikator Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dengan nilai 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat efektif dan hampir memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang kurang baik secara data namun hal tersebut disebabkan adanya perubahan metode penilaian SPIP oleh BPKP dimana perubahan tersebut berlaku pada saat penilaian di tahun 2025, dengan selisih peningkatan menjadi -0,400. Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pada Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi di bawah ini.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	TARGET AKHIR	PENINGKATAN (%)	KEMAJUAN (%)
1	Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi	Nilai	1,000	0,600	1,000	-0,400	-0,400

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap realisasi dan Capaian Tahun 2024 dijadikan salah satu tolok ukur atau sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Apabila disandingkan dengan realisasi tahun 2024 Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi mengalami penurunan dari 1,000 menjadi 0,600.



Selain itu, dari sisi persentase capaian kinerja juga terjadi peningkatan pada tahun 2024 capaian kinerja berada pada angka 100,00persen, sedangkan pada Tahun 2025 menurun menjadi 60persen, atau sebesar -0,400.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 mengalami kondisi transisi terhadap penyesuaian pola penilaian terbaru oleh BPKP. Adapun Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi disajikan pada tabel 3.10 berikut ini :

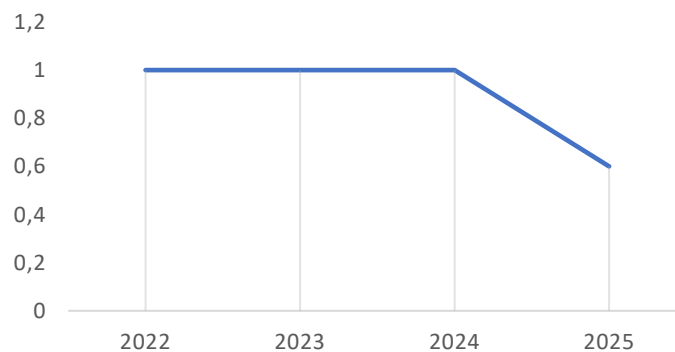
Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi	1,000	0,600	-0,400	Capaian Menurun

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

Pencapaian pada indicator Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 secara akumulasi mengalami progress yang cukup baik walaupun adanya penurunan ditahun 2025 akibat penyesuaian pola penilaian dari BPKP. Berikut dilampirkan trend capaian Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 pada grafik 3.2 dibawah ini:

Grafik 3.2
Trend capaian Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi Tahun 2022-2025



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2024



**C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Indeks
Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi**

Capaian kinerja pada Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 belum mencaapai target yang telah ditetapkan pada target akhir Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan capaian sebesar 60 persen, dimana target pada akhir renstra yaitu dengan nilai 1,000 dan realisasi pada tahun 2025 yaitu dengan nilai 0,600. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi	0,600	60	1,000	0,60

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan oleh BPKP Jawa Barat mengenai hasil rata-rata nasional Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi di tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan Capaian Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi mencapai 60,00 persen, dengan realisasi sebesar 0,600 dari target 1,000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang memiliki realisasi sebesar 1,000 atau 100,00persen, pada Tahun 2025 terjadi penurunan sebesar 0,400.



Penurunan capaian ini terutama dipengaruhi oleh adanya perubahan pola dan metode penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengukuran SPIP Terintegrasi, sehingga indikator yang sebelumnya dapat tercapai menjadi lebih ketat dalam proses penilaiannya.

Faktor Pendukung:

1. Adanya komitmen perangkat daerah dalam menerapkan pengendalian intern sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring oleh APIP terhadap penerapan SPIP pada perangkat daerah.
3. Tersedianya kebijakan dan pedoman terkait implementasi SPIP terintegrasi.

Faktor Penghambat:

1. Perubahan pola dan metode penilaian SPIP oleh BPKP yang menyebabkan penyesuaian dalam proses pengukuran capaian indikator.
2. Perangkat daerah masih dalam tahap penyesuaian terhadap mekanisme penilaian baru pada SPIP Terintegrasi.
3. Perlunya penguatan pemahaman terhadap indikator hasil pada aspek ketaatan sesuai metodologi penilaian terbaru.

Secara umum, capaian Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 sebesar 60,00persen dengan realisasi 0,600 dari target 1,000 menunjukkan bahwa indikator kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Penurunan capaian dibandingkan Tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh adanya perubahan metode penilaian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga diperlukan penyesuaian dalam penerapan dan pengukuran indikator SPIP terintegrasi pada perangkat daerah.

F. Program Pendukung Capaian Kinerja Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis pertama Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan yang didukung dengan 4 (empat) indikator yang salah satunya yaitu Indeks Kematangan Komponen Hasil



pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi yang ketercapaiannya didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi yaitu sebesar 60 persen yang menyimpulkan bahwa Capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.8:

Gambar 3.8
Pendukung Capaian Kinerja
Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi



G. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi telah tercapai 95,21 persen dengan efisiensi 4,79 persen sebagaimana tabel 3.12 berikut :



Tabel 3.12
Dukungan dan Efisiensi Anggaran Program
Indeks Kematangan Komponen Hasil pada Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3	90	100	113,44	253.751.000,-	241.597.200,-	95,21	
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	100,00	253.751.000,-	241.597.200,-	95,21	Efisien
TOTAL					253.751.000,-	241.597.200,-	95,21	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Struktur dan Proses SPIP pada level 3 berhasil melampaui target yang ditetapkan, dari target 90persen terealisasi sebesar 100persen atau mencapai 113,44persen.

Selain itu, pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi kepada 36 Perangkat Daerah serta Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebanyak 2 kegiatan dapat direalisasikan seluruhnya atau mencapai 100persen, yang menunjukkan bahwa seluruh rencana kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari sisi anggaran, alokasi sebesar Rp253.751.000,- terealisasi sebesar Rp241.597.200,- atau 95,21persen, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan efisien serta mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi positif dalam mendorong penerapan SPIP dan penguatan upaya pencegahan korupsi pada perangkat daerah.

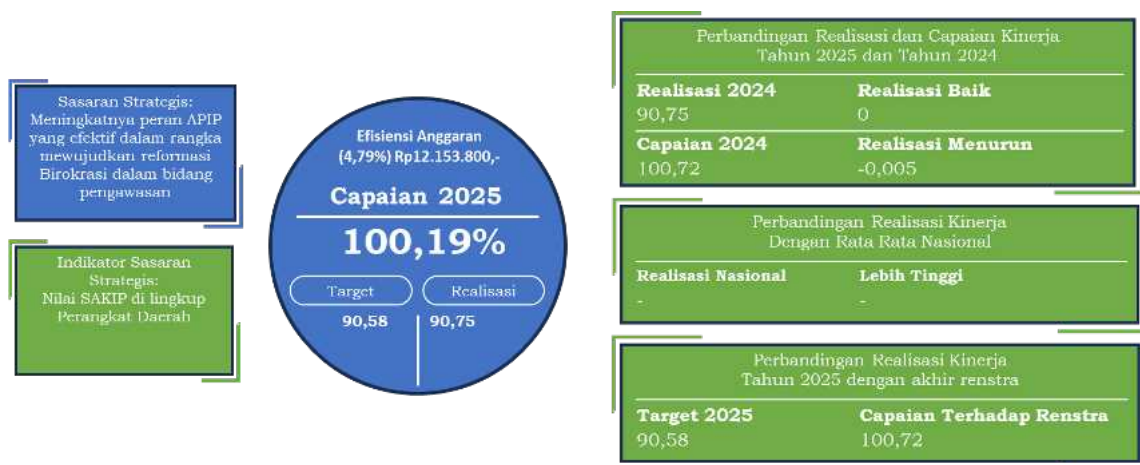


3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah 2025

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengukur tingkat akuntabilitas dan kualitas penerapan manajemen kinerja pada setiap perangkat daerah. Penilaian ini menggambarkan sejauh mana proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

Semakin tinggi nilai SAKIP yang diperoleh, maka menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mampu mengelola kinerja organisasi secara lebih terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar infografis 3.9 sebagai berikut:

Gambar 3.9
Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024,
Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional
(Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah)



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

Berdasarkan data pada gambar 3.9, capaian indikator Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Tahun 2025 mendapatkan nilai 90,75. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat efektif dan hampir memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sama, dengan tidak ada selisih peningkatan, namun apabila disandingkan dengan persentase capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 0,005 persen.



Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pada Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah di bawah ini.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024 Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah pada Penilaian Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor Nomor : 700.1.2.1/430-1tda perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025. Capaian Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Tahun 2025 mendapatkan nilai 90,75 dari target nilai 90,58. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik serta mampu melampaui target kinerja yang telah direncanakan.

Dengan capaian tersebut yang melebihi target, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan optimal, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran kinerja organisasi secara keseluruhan.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Tahun 2025
Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAAN (%) TAHUN 2025
1	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90,58	90,75	100,19

Sumber : Hasil LHE Inspektorat, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024, realisasi kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Realisasi Tahun 2024 tercatat dengan nilai 90,75, sedangkan pada Tahun 2025 masih mempertahankan capaian tahun sebelumnya yaitu 90,75 sehingga tidak terdapat peningkatan.

Selain itu, apabila dilihat dari sisi persentase capaian kinerja terjadi penurunan Dimana pada Tahun 2024 capaian kinerja berada pada angka 100,72persen,



sedangkan pada Tahun 2025 pada 100,19persen, atau terjadi penurunan sebesar 0,005 persen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 masih sama tidak ada perubahan secara signifikan dari tahun sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa masih dapat mempertahankan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pencapaian target kinerja organisasi. Adapun Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah disajikan pada tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	90,75	90,75	0	Tidak Ada Peningkatan

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2026, dimana harus terealisasi dengan persentase 100 persen pada tahun terakhir renstra yaitu tahun 2026. Capaian kinerja pada Indikator Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Tahun 2025 telah melebihi target yang telah ditetapkan pada target akhir Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan capaian sebesar 100,72 persen, dimana target pada akhir renstra yaitu sebesar 90,10 dan realisasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 90,75. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)



1	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	90,75	100,19	90,10	100,72
---	---	-------	--------	-------	--------

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan oleh Kementerian PAN-RB mengenai hasil rata-rata nasional Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah di tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan Dan Upaya Perbaikan Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada lingkup Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang baik dengan realisasi 90,75 dari target 90,58 atau sebesar 100,19persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen kinerja perangkat daerah telah berjalan cukup efektif serta mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SADAYA turut mendukung proses pengukuran dan monitoring seluruh aspek SAKIP sehingga proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan terukur.

Faktor Pendukung:

1. Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.
2. Pemanfaatan aplikasi SADAYA dalam memantau dan mengukur seluruh aspek penilaian SAKIP secara lebih sistematis.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh tim pembina SAKIP.
4. Meningkatnya pemahaman perangkat daerah terhadap penerapan manajemen kinerja.

Faktor Penghambat:

1. Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman antar perangkat daerah dalam implementasi SAKIP.
2. Konsistensi pengisian dan pemutakhiran data kinerja pada beberapa perangkat daerah masih perlu ditingkatkan.



3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan analisis data kinerja.

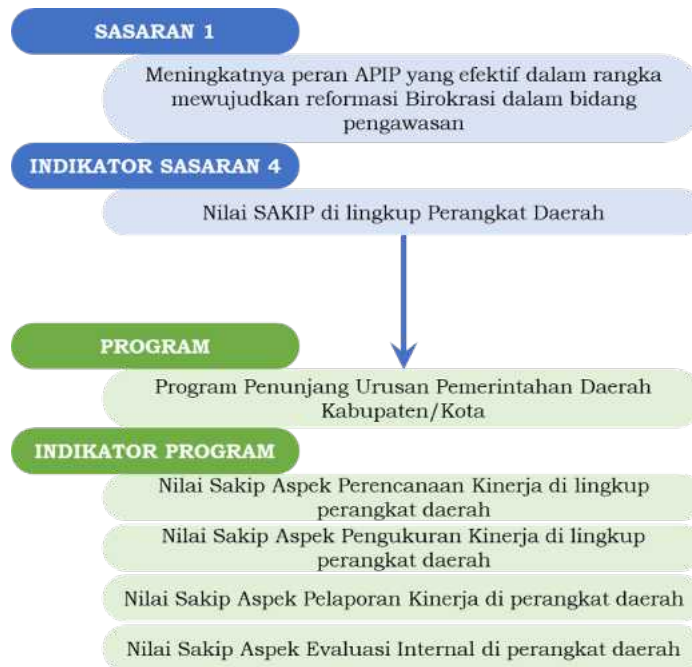
Secara umum, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Perangkat Daerah telah mencapai target dengan capaian 100,19persen, sehingga menunjukkan pengelolaan manajemen kinerja yang baik. Pemanfaatan aplikasi SADAYA juga turut mendukung proses pengukuran dan pemantauan seluruh aspek SAKIP secara lebih terintegrasi, sehingga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

F. Program Pendukung Capaian Kinerja Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis pertama Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan yang didukung dengan 4 (empat) indikator yang salah satunya yaitu Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah yang ketercapaiannya didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah yaitu sebesar 101,19 persen yang menyimpulkan bahwa Capaian kinerja tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.6:

Gambar 3.9
Pendukung Capaian Kinerja
Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah





G. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah telah mencapai 73,55 dengan efisiensi anggaran sebesar 26,45 persen atau setara dengan Rp1.601.500,-. Berikut disampaikan pada tabel 3.14 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :

Tabel 3.14
Dukungan dan efisiensi anggaran program
Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah	28,16	27,6	98,01	6.055.000,00	4.453.500,00	73,55	
	Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah	27,78	27,6	99,35				
	Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	13,03	13,8	105,87				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
	di perangkat daerah							
	Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah	21,70	21,75	100,21				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	100	100	100	6.055.000,00	4.453.500,00	73,55	Efisiensi
TOTAL					6.055.000,00	4.453.500,00	73,55	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, secara umum capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal di lingkup perangkat daerah menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar indikator mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, seperti pada aspek pelaporan kinerja yang mencapai 105,87persen dan aspek evaluasi internal sebesar 100,21persen, sementara aspek perencanaan dan pengukuran kinerja juga mendekati target yang telah ditetapkan.

Selain itu, pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikator Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah berhasil direalisasikan sebesar 100persen, yang menunjukkan bahwa seluruh dokumen kinerja telah disusun dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan.

Dari sisi anggaran, alokasi sebesar Rp6.055.000,00 terealisasi sebesar Rp4.453.500,00 atau 73,55persen, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan efisien dan tetap mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, program dan kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas penerapan SAKIP di lingkup perangkat daerah.

3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal Tahun 2025

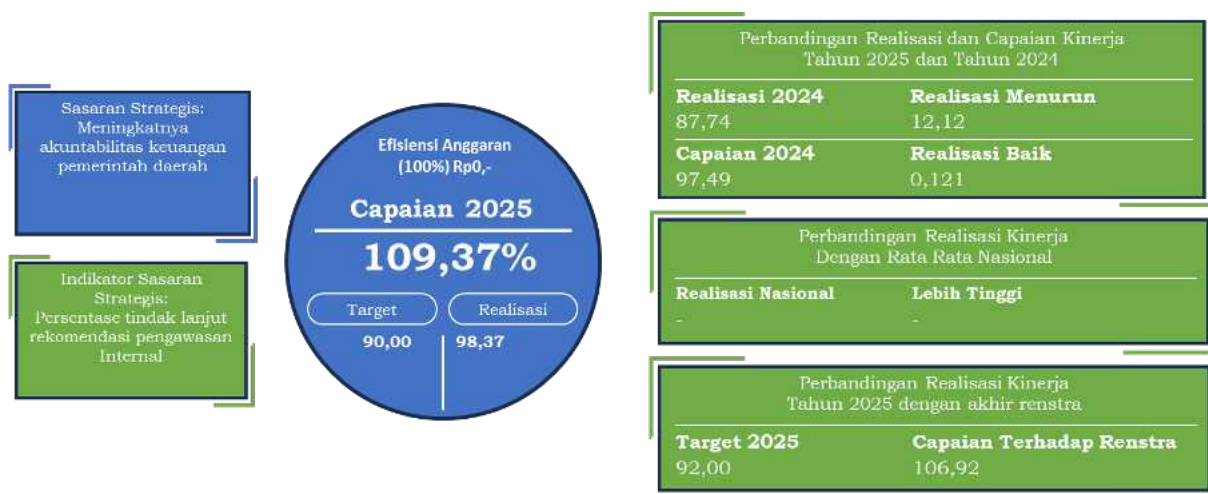


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal menggambarkan tingkat penyelesaian atas rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai hasil dari kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Indikator ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi pengawasan guna memperbaiki tata kelola serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal dapat dilihat pada gambar infografis 3.11 sebagai berikut:

Gambar 3.11
Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024,
Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional
(Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal)



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, realisasi indikator mencapai 98,37 dari target 90,00 atau sebesar 109,37persen, sehingga menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang memiliki realisasi 87,74 dengan capaian 97,49persen, terjadi peningkatan kinerja yang signifikan pada tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 100persen karena capaian kinerja dapat diraih tanpa penggunaan



anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dinilai efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi. Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pada Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal di bawah ini.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal pada Penilaian Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal

Capaian persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 98,37 dari target 90,00 atau mencapai 109,37persen. Capaian tersebut merupakan akumulasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bogor, yang secara bersama-sama menjadi dasar pengukuran tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal di lingkungan perangkat daerah. Hasil ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan kualitas pengendalian internal.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Tahun 2025
Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%) TAHUN 2025
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	Persen	90,00	98,37	109,37

Sumber : Hasil BA TLHP APIP Provinsi Jabar dan APIP Inspektorat, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal

Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2024. Realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 98,37 dari target 90,00 atau mencapai 109,37persen, sedangkan pada tahun 2024 realisasi sebesar 87,74 dengan capaian 97,49persen.

Dengan demikian, terjadi peningkatan realisasi sebesar 12,12 poin dan peningkatan capaian kinerja sebesar 0,121. Hasil ini menunjukkan adanya perbaikan dalam



penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal yang bersumber dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bogor, sehingga tingkat akuntabilitas dan pengendalian internal perangkat daerah semakin meningkat. Adapun Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal disajikan pada tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	87,74	98,37	0,121	Capaian Meningkat

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal

Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2026, dimana harus terealisasi dengan persentase 100 persen pada tahun terakhir renstra yaitu tahun 2026. Capaian kinerja pada Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal Tahun 2025 telah melebihi target yang telah ditetapkan pada target akhir Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan capaian sebesar 106,92 persen, dimana target pada akhir renstra yaitu sebesar 92 persen dan realisasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 90 persen. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.17 berikut ini :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal	98,37	109,37	92	106,92

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan baik oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri mengenai hasil rata-rata nasional untuk Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal khususnya di tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal

Keberhasilan capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Internal ditunjukkan dengan realisasi sebesar 98,37 dari target 90,00 atau mencapai 109,37persen. Hal ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan terkoordinasi. Capaian tersebut merupakan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang bersumber dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bogor, yang secara konsisten dipantau melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala.

Faktor Pendukung:

1. Adanya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
2. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah dengan APIP dalam proses pemantauan tindak lanjut rekomendasi.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi secara berkala.

Faktor Penghambat:

1. Masih terdapat beberapa rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lanjut karena membutuhkan kelengkapan dokumen atau proses administrasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

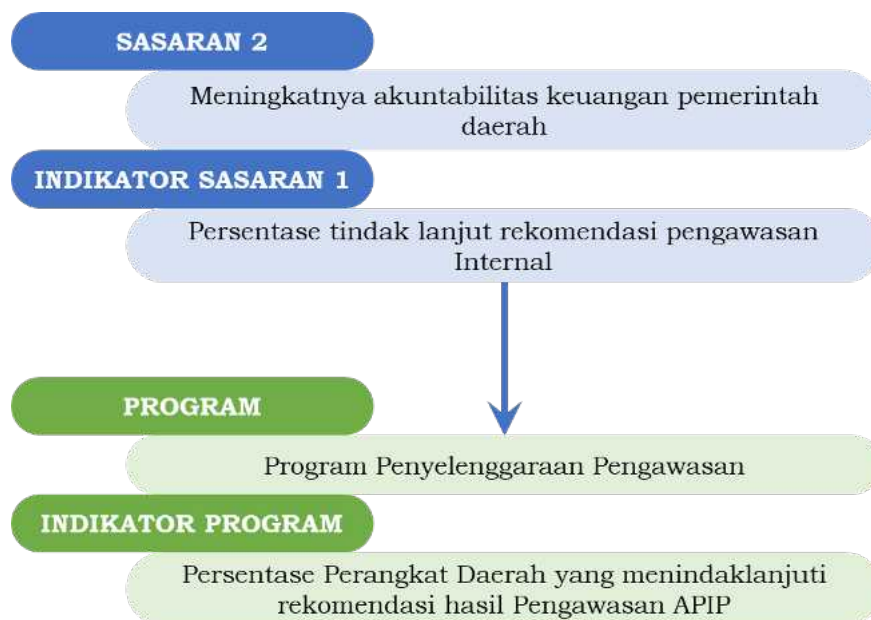


2. Adanya keterbatasan waktu dalam proses verifikasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

F. Program Pendukung Capaian Kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis kedua Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang didukung dengan 4 (empat) indikator yang salah satunya yaitu Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal yang ketercapaiannya didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal yaitu sebesar 109,37 persen yang menyimpulkan bahwa Capaian kinerja tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.11:

Gambar 3.11
Pendukung Capaian Kinerja
Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal



G. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai



program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal telah mencapai 98,37 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 100 persen atau setara dengan Rp0,-. Berikut disampaikan pada tabel 3.18 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :

Tabel 3.18
Dukungan dan Efisiensi Anggaran
Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan APIP	90	98,37	109,37	0	0	0	Efisien
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00	0	0	0	
TOTAL					0	0	0	

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, indikator Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 98,37 dari target 90 atau mencapai 109,37persen. Selain itu, pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, indikator Persentase Capaian Target



Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga tercapai 100persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berjalan dengan baik dan mampu mendorong perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Adapun dalam pelaksanaannya, kegiatan pengawasan ini tidak menggunakan alokasi anggaran, sehingga seluruh capaian kinerja yang diperoleh dapat dikategorikan efisien tanpa penggunaan biaya kegiatan.

3.6 Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal Tahun 2025

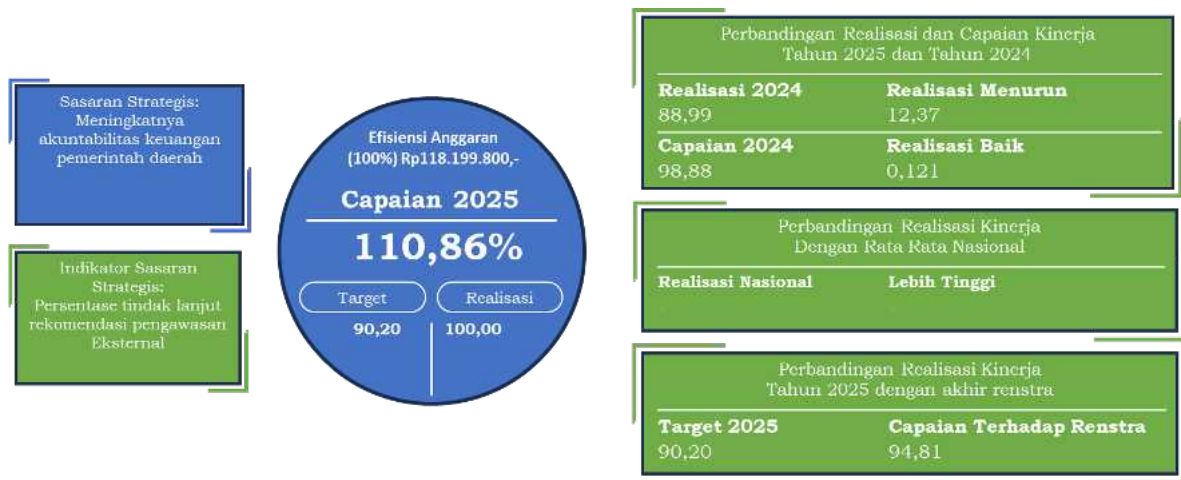
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Eksternal merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal dapat dilihat pada gambar infografis 3.13 sebagai berikut:

Gambar 3.13

Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional
(Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Eksternal pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 90,20persen, realisasi yang dicapai mencapai 100persen sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 110,86persen atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024 dimana realisasi tindak lanjut rekomendasi BPK-RI tercatat sebesar 88,99persen dengan capaian kinerja 98,88persen. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal pada Penilaian Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal

Capaian Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 100,00 persen dari target 90,20 persen atau mencapai 110,86 persen. Capaian tersebut merupakan akumulasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), yang secara bersama-sama menjadi dasar pengukuran tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal di lingkungan perangkat daerah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Hasil ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan kualitas pengendalian internal.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Tahun 2025
Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%) TAHUN 2025
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	Persen	90,20	100,00	110,86

Sumber : Hasil BA TLHP BPK, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Eksternal pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2024 realisasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tercatat sebesar 88,99 persen dengan capaian kinerja 98,88 persen dari target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada Tahun 2025 realisasi tindak lanjut meningkat menjadi 100 persen dari target 90,20 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 110,86 persen atau melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap rekomendasi pengawasan eksternal. Adapun Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal disajikan pada tabel 3.20 berikut ini :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		



1	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	88,99	100	0,121	Capaian Meningkat
---	---	-------	-----	-------	-------------------

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal

Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2026, dimana harus terealisasi dengan persentase 100 persen pada tahun terakhir renstra yaitu tahun 2026. Capaian kinerja pada Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal Tahun 2025 telah melebihi target yang telah ditetapkan pada target akhir Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan capaian sebesar 110,86 persen, dimana target pada akhir renstra yaitu sebesar 92 persen dan realisasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 90,20 persen. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.21 berikut ini :

Tabel 3. 21
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal	100	110,86	90,20	110,86

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan baik oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengenai hasil rata-rata



nasional untuk Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal khususnya di tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal

Capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Eksternal pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dimana realisasi mencapai 100 persen dari target 90,20 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 110,86 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa proses tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dapat dilaksanakan secara optimal oleh perangkat daerah. Keberhasilan tersebut juga mencerminkan adanya peningkatan koordinasi dan komitmen perangkat daerah dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut beberapa faktor yang mendukung maupun yang menjadi kendala dalam proses penyelesaiannya.

Faktor Pendukung

1. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
2. Koordinasi yang cukup baik antara Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan perangkat daerah terkait.
3. Adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres tindak lanjut rekomendasi.
4. Dukungan regulasi yang mengatur kewajiban penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Faktor Penghambat

1. Masih terdapat beberapa rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lama karena berkaitan dengan administrasi atau dokumen pendukung.
2. Perubahan atau rotasi pejabat pada perangkat daerah yang menyebabkan proses tindak lanjut memerlukan penyesuaian kembali.
3. Koordinasi antar unit kerja yang terkadang belum berjalan secara optimal.

Secara umum, berbagai faktor pendukung tersebut mampu mendorong tercapainya kinerja yang baik dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan



eksternal. Namun demikian, beberapa kendala yang ada tetap perlu diperhatikan agar proses tindak lanjut dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

G. Program Pendukung Capaian Kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal

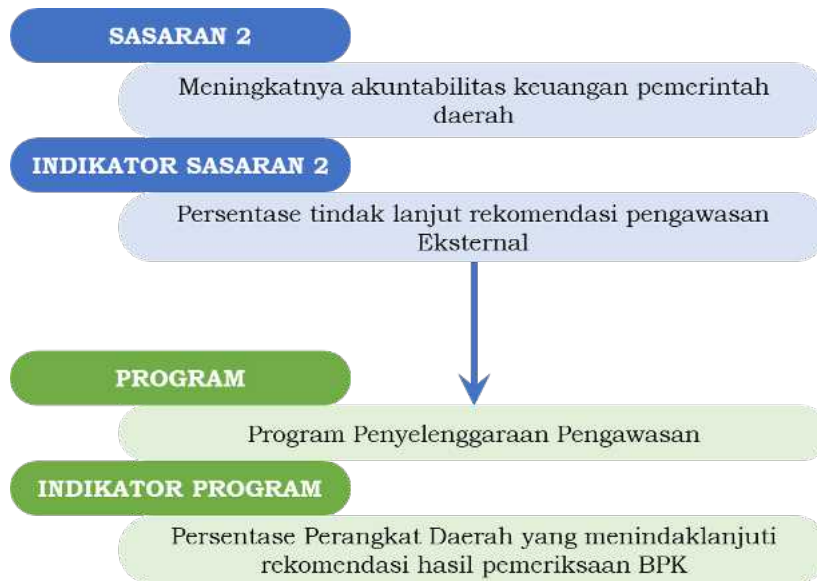
Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis kedua Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang didukung dengan 4 (empat) indikator yang salah satunya yaitu Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal yang ketercapaiannya didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal yaitu sebesar 110,86 persen yang menyimpulkan bahwa Capaian kinerja tersebut sudah melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.14:

Gambar 3.14
Pendukung Capaian Kinerja
Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>





H. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal telah mencapai 100 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 100 persen atau setara dengan Rp0,-. Berikut disampaikan pada tabel 3.22 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :

Tabel 3.22
Dukungan dan Efisiensi Anggaran
Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	90,20	100	100,86	0	0	0	Efisien



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00	0	0	0	
TOTAL					0	0	0	

Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan, indikator Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Dari target sebesar 90,20 persen, realisasi yang dicapai adalah 100 persen atau sebesar 100,86 persen, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dengan terbangunnya adanya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan secara optimal. Selain itu pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, indikator Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga berhasil mencapai target sebesar 100 persen.

Secara keseluruhan capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan dengan baik dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah. Adapun dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak menggunakan alokasi anggaran sehingga capaian kinerja yang diperoleh dapat dikategorikan efisien.

3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Tahun 2025

Kepatuhan pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan.

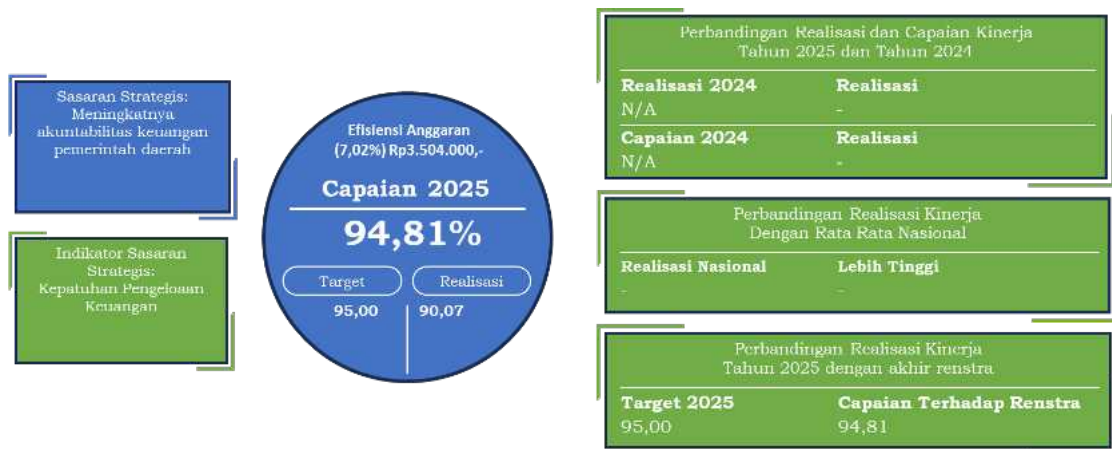


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Melalui penerapan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan, diharapkan setiap perangkat daerah dapat melaksanakan penggunaan anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif serta mampu meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya. Capaian Indikator Kinerja Utama Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dapat dilihat pada gambar infografis 3.15 sebagai berikut:

Gambar 3.15
Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024,
Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional
(Kepatuhan Pengelolaan Keuangan)



Capaian kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan tingkat capaian sebesar 94,81%. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 95,00, realisasi yang dicapai adalah 90,07. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan relatif optimal meskipun masih sedikit di bawah target yang direncanakan.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada Penilaian Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

Capaian Kepatuhan Pengelolaan Keuangan tahun 2025 mengacu pada hasil Hasil Penilaian Indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan nomor surat: 000/413-Sekret yang dimana dalam pengukuran pengelolaan keuangan mengacu terhadap 5



(lima) komponen penilaian yaitu Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu, Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan, Kepatuhan terhadap anggaran, Realisasi anggaran terhadap DPA, dan Transparansi pengelolaan keuangan daerah. Untuk pencapaian tahun 2025 pada indikator kepatuhan pengelolaan keuangan menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi sebesar 90,07 persen dari target 95,00 persen atau mencapai 94,81 persen. Hasil ini menjadikan bahan evaluasi kedepan sebagai perbaikan khususnya pada konteks kepatuhan pengelolaan keuangan.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Tahun 2025
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%) TAHUN 2025
1	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	95	90,07	94,81

Sumber : Hasil BA TLHP BPK, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 94,81 persen. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 95,00 persen realisasi yang berhasil dicapai adalah 90,07 persen.

Adapun untuk Tahun 2024, data realisasi dan capaian kinerja pada indikator ini belum tersedia atau N/A, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan secara langsung terhadap kinerja tahun sebelumnya. Oleh karena itu capaian pada Tahun 2025 menjadi baseline awal dalam pengukuran kinerja indikator kepatuhan pengelolaan keuangan untuk evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Adapun Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal disajikan pada tabel 3.24 berikut ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan



NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	N/A	90,07	-	-

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Kepatuhan Pengeloaan Keuangan

Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2026, dimana harus terealisasi dengan persentase 100 persen pada tahun terakhir renstra yaitu tahun 2026. Capaian kinerja pada Kepatuhan Pengeloaan Keuangan Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan pada target akhir Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dengan capaian sebesar 94,81 persen, dimana target pada akhir renstra yaitu sebesar 95 persen dan realisasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 90,07 persen. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.25 berikut ini :

Tabel 3. 25
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Kepatuhan Pengeloaan Keuangan

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	90,07	94,81	95	94,81

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan secara nasional untuk Kepatuhan Pengeloaan Keuangan di tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Kepatuhan Pengeloaan Keuangan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Capaian kinerja Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada Tahun 2025 mencapai 94,81 persen dari target 95,00 persen dengan realisasi nilai sebesar 90,07 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan relatif mendekati target yang telah ditetapkan. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target capaian tersebut menggambarkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran kepatuhan pengelolaan keuangan tersebut didasarkan pada lima komponen penilaian, yaitu: penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu, pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan, kepatuhan terhadap anggaran, realisasi anggaran terhadap DPA, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kelima komponen tersebut menjadi dasar dalam menilai sejauh mana perangkat daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi. Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Faktor Pendukung

1. Adanya regulasi dan pedoman yang jelas dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Koordinasi yang cukup baik antara perangkat daerah dengan unit pengelola keuangan.
3. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap tata kelola keuangan daerah dan pelaporan keuangan.

Faktor Penghambat

1. Masih terdapat keterlambatan administrasi dalam penyampaian beberapa dokumen pendukung pelaporan keuangan.
2. Proses penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah yang masih memerlukan penyesuaian di beberapa perangkat daerah.
3. Perbedaan tingkat pemahaman pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Tahun 2025 merupakan masa transisi dikarenakan penghitungan kepatuhan pengelolaan keuangan baru dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga masih



terdapat miss persepsi mengenai perhitungan kepatuhan pengelolaan keuangan.

Secara umum, capaian kinerja ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan konsistensi dan koordinasi agar tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

F. Program Pendukung Capaian Kinerja Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis kedua Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang didukung dengan 4 (empat) indikator yang salah satunya yaitu Kepatuhan Pengelolaan Keuangan yang ketercapaiannya didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Kepatuhan Pengelolaan Keuangan yaitu sebesar 94,81 persen yang menyimpulkan bahwa Capaian kinerja tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.16:

Gambar 3.16
Pendukung Capaian Kinerja
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan



G. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Keuangan yang mencapai 92,98 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 7,02 persen atau setara dengan Rp3.504.000,-. Berikut disampaikan pada tabel 3.22 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :

Tabel 3.26
Dukungan dan Efisiensi Anggaran
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Anggaran	95	90,07	94,81	49.904.000,-	46.400.000,-	92,98	Efisien
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	2 Laporan	2 Laporan	100,00	49.904.000,-	46.400.000,-	92,98	
TOTAL					49.904.000,-	46.400.000,-	92,98	

Berdasarkan capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator Persentase Kepatuhan Anggaran menunjukkan realisasi sebesar 90,07 persen dari target 95 persen atau mencapai 94,81 persen, sehingga secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan telah berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Selain itu pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Waktu dan Sesuai Regulasi berhasil direalisasikan 100 persen, yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan administrasi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan dari sisi anggaran, alokasi sebesar Rp49.904.000,- terealisasi sebesar Rp46.400.000,- atau 92,98 persen sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan efisien serta mampu mendukung pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib dan akuntabel.

3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda Tahun 2025

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah (Itda) dimaksudkan untuk mengukur tingkat penyelesaian atas rekomendasi yang diberikan dalam laporan hasil pemeriksaan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perangkat daerah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan guna memperbaiki tata kelola serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semakin tinggi persentase tindak lanjut yang dicapai, maka menunjukkan bahwa perangkat daerah memiliki komitmen yang baik dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan serta melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda dapat dilihat pada gambar infografis 3.17 sebagai berikut:



Gambar 3.11

Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional
(Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida)



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator yang ditetapkan menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat capaian sebesar 109,89%. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 91,00, realisasi yang berhasil dicapai adalah 100,00, sehingga kinerja melampaui target yang direncanakan. Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pada Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida di bawah ini.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida pada Penilaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida

Capaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 100,00 persen dari target 91,00 atau mencapai 109,89 persen. Capaian tersebut merupakan akumulasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Bogor dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang secara bersama-sama menjadi dasar pengukuran tingkat penyelesaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida.



Hasil ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan kualitas pengendalian internal.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Tahun 2025
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%) TAHUN 2024
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Persen	91,00	100,00	109,89

Sumber : Hasil BA TLHP BPK dan APIP Inspektorat, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida

Berdasarkan data capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 100,00 persen dari target 91,00 persen atau mencapai 109,89 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah (Itida) dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh perangkat daerah.

Adapun untuk tahun 2024, data perbandingan capaian kinerja belum tersedia (N/A), sehingga capaian pada tahun 2025 menjadi dasar pengukuran kinerja pada indikator ini. Hasil tersebut mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan guna meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal disajikan pada tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	N/A	100,00	-	Capaian Meningkat

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025



C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2025-2026, indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda menunjukkan capaian yang sangat baik. Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 91,00 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100,00 persen atau mencapai 109,89 persen dari target kinerja.

Apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2026, capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 108,70 persen, yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah melampaui target yang direncanakan dalam perencanaan strategis. Hal ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah (Itda) guna meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.17 berikut ini :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	100,00	109,89	92	108,70

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan mengenai hasil rata-rata nasional untuk Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda khususnya di tahun 2025.



E. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda

Capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 100,00 persen dari target 91,00 persen atau mencapai 109,89 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah memiliki komitmen yang baik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan guna memperbaiki tata kelola serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari upaya penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah (Itda) melalui proses pemantauan dan verifikasi secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung:

1. Adanya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi secara berkala oleh APIP.
3. Koordinasi yang baik antara perangkat daerah dengan Inspektorat dalam proses penyelesaian tindak lanjut.

Faktor Penghambat:

1. Beberapa rekomendasi memerlukan proses administrasi dan kelengkapan dokumen yang cukup panjang.
2. Adanya kebutuhan waktu tambahan untuk proses verifikasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

H. Program Pendukung Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis kedua Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang didukung dengan 4 (empat) indikator yang salah satunya yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda yang ketercapaiannya didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi capaian



Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita yaitu sebesar 109,89 persen yang menyimpulkan bahwa Capaian kinerja tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.15:

Gambar 3.15
Pendukung Capaian Kinerja
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita



I. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita telah mencapai 92,98 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 7,02 persen atau setara dengan Rp3.504.000,-. Berikut disampaikan pada tabel 3.18 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :



Tabel 3.18
Dukungan dan Efisiensi Anggaran
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	100	100	49.904.000,-	46.400.000,-	92,98	Efisien
	Persentase Kepatuhan Anggaran	100	100	100				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	2 Laporan	2 Laporan	100,00	49.904.000,-	46.400.000,-	92,98	
TOTAL					49.904.000,-	46.400.000,-	92,98	

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan Secara Tepat Waktu berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, yang menunjukkan bahwa penyampaian laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan. Sementara itu, indikator Persentase Kepatuhan Anggaran mencapai 90,07 dari target 100 atau sebesar 94,81 persen, yang menunjukkan bahwa kepatuhan dalam pengelolaan anggaran secara umum telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Selain itu, pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi juga tercapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan administrasi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Dari sisi anggaran, alokasi sebesar Rp49.904.000,- terealisasi sebesar Rp46.400.000,- atau 92,98 persen, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan efisien serta mampu mendukung pelaksanaan administrasi keuangan secara tertib dan akuntabel.

3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM Tahun 2025

Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM dimaksudkan untuk menunjukkan banyaknya unit kerja atau perangkat daerah yang diajukan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui proses evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengusulan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan integritas, serta perbaikan kualitas pelayanan publik pada unit kerja. Semakin banyak unit kerja yang diusulkan, maka menunjukkan komitmen organisasi dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM dapat dilihat pada gambar infografis 3.16 sebagai berikut:

Gambar 3.16
Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional
(Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM)



Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator yang ditetapkan menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen. Dari target yang telah ditetapkan sebanyak 5 unit kerja dengan realisasi yang berhasil dicapai 5 unit kerja, sehingga capaian kinerja mencapai target yang direncanakan. Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pada Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM di bawah ini.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM pada Penilaian Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, indikator yang ditetapkan telah berhasil dicapai secara optimal dengan realisasi sebanyak 5 unit kerja dari target 5 unit kerja atau mencapai 100,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh unit kerja yang direncanakan untuk diusulkan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut merupakan hasil dari proses pendampingan kepada unit kerja yang diusulkan serta pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) sebelum diajukan untuk proses evaluasi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan integritas, serta pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja yang diusulkan.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Tahun 2025
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%) TAHUN 2024
1	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	5	5	100,00

Sumber : Hasil BA TLHP BPK dan APIP Inspektorat, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator Jumlah Unit Kerja yang Diusulkan Mendapatkan Predikat WBK/WBBM pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar



5 unit kerja dari target 5 unit kerja atau mencapai 100,00 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh unit kerja yang direncanakan untuk diusulkan telah berhasil dipenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Adapun untuk Tahun 2024 realisasi sebanyak 5 unit kerja dengan capaian 100 persen, hasil ini menunjukkan adanya komitmen dalam mendorong unit kerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola, integritas, serta pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pengusulan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM disajikan pada tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	5	5	-	Capaian Meningkat

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2025–2026, indikator Jumlah Unit Kerja yang Diusulkan Mendapatkan Predikat WBK/WBBM menunjukkan realisasi sebesar 5 unit kerja dari target kinerja Tahun 2025 yaitu 5 unit kerja atau mencapai 100,00 persen.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra yang ditetapkan sebesar 6 unit kerja terhadap capaian kinerja Tahun 2025 telah mencapai 83,33 persen dari target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah berjalan dengan baik melalui proses pendampingan dan penilaian internal, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai target akhir yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Adapun sandingan antara capaian



kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.17 berikut ini :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	5	100,00	6	83,33

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan mengenai hasil rata-rata nasional untuk Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM khususnya di tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM

Capaian kinerja Jumlah Unit Kerja yang Diusulkan Mendapatkan Predikat WBK/WBBM pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi sebanyak 5 unit kerja dari target 5 unit kerja atau mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pembinaan, pendampingan, serta penilaian internal terhadap unit kerja yang diusulkan telah berjalan dengan baik dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Faktor Pendukung:

1. Adanya komitmen pimpinan dan unit kerja dalam pembangunan zona integritas.
2. Pelaksanaan pendampingan dan pembinaan secara berkala kepada unit kerja yang diusulkan.



3. Peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kesiapan unit kerja.
4. Koordinasi yang baik antar perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Faktor Penghambat:

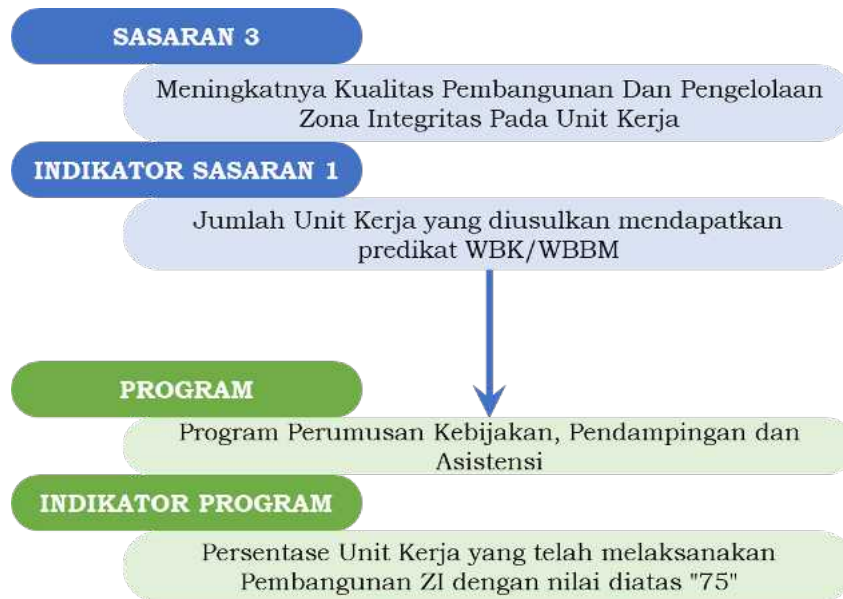
1. Perbedaan tingkat kesiapan dan pemahaman unit kerja dalam memenuhi komponen penilaian zona integritas.
2. Perlunya pemenuhan dokumen dukung dan eviden yang cukup banyak dalam proses penilaian.
3. Keterbatasan waktu dalam proses pembinaan dan penyempurnaan indikator penilaian sebelum diusulkan.

F. Program Pendukung Capaian Kinerja Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis ketiga Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja yang didukung melalui indikator Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM yang ketercapaiannya didukung oleh Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM yaitu sebesar 100,00 persen yang menyimpulkan bahwa Capaian kinerja tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.17:



Gambar 3.17
Pendukung Capaian Kinerja
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM



G. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM telah mencapai 81,68 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 18,32 persen atau setara dengan Rp6.750.000,-. Berikut disampaikan pada tabel 3.18 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :

Tabel 3.18
Dukungan dan Efisiensi Anggaran
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan ZI dengan nilai diatas "75"	10	15	150,00	253.751.000,-	241.597.200,-	81,68	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	persen	KET
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	100,00	253.751.000,-	241.597.200,-	81,68	Efisien
TOTAL					253.751.000,-	241.597.200,-	81,68	

Berdasarkan capaian kinerja pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, indikator Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan nilai di atas 75 menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target 10 unit kerja, realisasi yang dicapai sebanyak 15 unit kerja atau sebesar 150,00 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas pada unit kerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi anggaran, alokasi sebesar Rp253.751.000,- terealisasi sebesar Rp241.597.200,- atau 81,86 persen, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dikategorikan efisien serta mampu mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah.

3.10 Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100) Tahun 2025

Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah dimaksudkan untuk mengukur banyaknya inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan telah memenuhi kriteria penilaian sehingga ditetapkan secara resmi sebagai inovasi daerah. Penetapan tersebut dilakukan setelah inovasi melalui proses evaluasi terhadap tingkat kematangan inovasi, yang menunjukkan bahwa inovasi tersebut telah diterapkan, memberikan manfaat, serta berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator ini juga menggambarkan tingkat kreativitas dan kemampuan perangkat daerah dalam mengembangkan solusi atau terobosan baru untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin banyak inovasi yang mencapai tingkat kematangan di atas 100, maka menunjukkan bahwa inovasi tersebut



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



telah berkembang dengan baik dan layak ditetapkan sebagai inovasi daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100) dapat dilihat pada gambar infografis 3.18 sebagai berikut:

Gambar 3.18
Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional
(Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100))



Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025 indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 1 inovasi realisasi yang dicapai adalah 0 inovasi atau sebesar 0,00%.

Hal tersebut disebabkan karena nilai inovasi Inspektorat masih berada pada tingkat kematangan sebesar 44, sehingga belum memenuhi kriteria penilaian untuk dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah yang mensyaratkan tingkat kematangan inovasi di atas 100. Oleh karena itu inovasi yang dikembangkan belum dapat diusulkan atau ditetapkan sebagai inovasi daerah pada tahun pelaporan. Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pada Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100 di bawah ini.



A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100 pada Penilaian Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 1 inovasi, realisasi yang dicapai adalah 0 inovasi atau sebesar 0,00%.

Kondisi tersebut terjadi karena tingkat kematangan inovasi pada Inspektorat masih berada pada nilai 44, sehingga belum memenuhi kriteria penilaian untuk dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah yang mensyaratkan tingkat kematangan inovasi di atas 100. Dengan demikian, inovasi yang dikembangkan belum dapat diusulkan atau ditetapkan sebagai inovasi daerah pada tahun pelaporan.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Tahun 2025
Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%) TAHUN 2025
1	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100	Inovasi	1	0	0

Sumber : Hasil BA TLHP BPK dan APIP Inspektorat, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah (tingkat kematangan inovasi >100) pada Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 1 inovasi, realisasi yang dicapai adalah 0 inovasi atau sebesar 0,00%.

Adapun untuk Tahun 2024, data realisasi dan capaian kinerja belum tersedia (N/A), sehingga belum dapat dilakukan perbandingan secara langsung antara capaian



Tahun 2025 dengan Tahun 2024. Capaian Tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah belum memenuhi kriteria tingkat kematangan inovasi yang dipersyaratkan untuk dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah. Berikut Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100 disajikan pada tabel 3.20 berikut ini :

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100	N/A	0	-	-

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2025–2026, indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah (tingkat kematangan inovasi >100) belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025 ditargetkan 1 inovasi, namun realisasi yang dicapai adalah 0 inovasi atau sebesar 0%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2025–2026 yang juga ditetapkan sebanyak 1 inovasi, maka capaian kinerja hingga Tahun 2025 masih belum mencapai target Renstra. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor masih memerlukan penguatan agar dapat memenuhi kriteria tingkat kematangan inovasi yang dipersyaratkan untuk dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.21 berikut ini :



Tabel 3.21

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat
kematangan inovasi >100

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100	0	0	1	0

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan mengenai hasil rata-rata nasional untuk Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100 khususnya di tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100

Capaian kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Ditetapkan Menjadi Inovasi Daerah (tingkat kematangan inovasi >100) pada Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 1 inovasi, realisasi yang dicapai adalah 0 inovasi atau sebesar 0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah belum memenuhi kriteria tingkat kematangan inovasi yang dipersyaratkan untuk dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah.

Selain itu, proses identifikasi dan pengembangan inovasi daerah masih memerlukan penguatan, mengingat ketersediaan informasi dan data terkait inovasi pada perangkat daerah masih terbatas, sehingga belum seluruh potensi inovasi dapat terinventarisasi dan dinilai tingkat kematangannya secara optimal.

Faktor Pendukung:

1. Adanya komitmen perangkat daerah dalam mendorong pengembangan inovasi daerah.



2. Tersedianya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan inovasi.
3. Adanya koordinasi antar perangkat daerah dalam pengumpulan informasi terkait inovasi.

Faktor Penghambat:

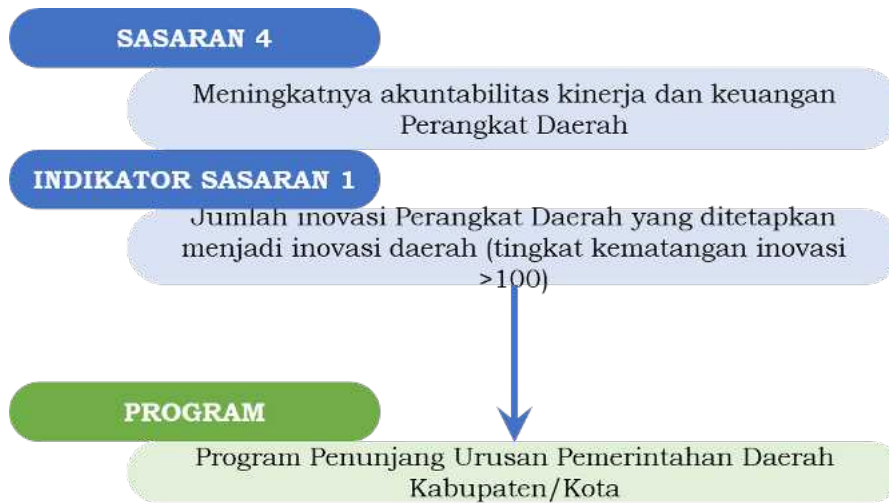
1. Ketersediaan informasi dan data inovasi pada perangkat daerah masih terbatas.
2. Belum optimalnya dokumentasi dan pelaporan inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah.
3. Tingkat kematangan inovasi yang dikembangkan masih belum memenuhi kriteria penilaian untuk dapat ditetapkan sebagai inovasi daerah.

F. Program Pendukung Capaian Kinerja Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis keempat Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang didukung melalui indikator Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100 yang ketercapaiannya didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung secara operasional dalam tercapainya peran dan fungsi inspektorat untuk melaksanakan kegiatan *Quality Assurance* dan *consulting*. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100 belum tercapai di tahun 2025 dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mencapai target di tahun 2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.19:



Gambar 3.19
Pendukung Capaian Kinerja
Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)



G. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100 melalui pengembangan Aplikasi SIPELARI sebagai wadah inovasi dalam hal pelayanan permohonan pelaksanaan reviu belum tercapai. Adapun dalam pengembangan aplikasi SIMAPAN tersebut dalam pengembangannya tidak berbasis anggaran. Berikut disampaikan pada tabel 3.22 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :



Tabel 3.22
Dukungan dan Efisiensi Anggaran
Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat
kematangan inovasi >100

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	88,38	91,74	103,80	0,-	0,-	0	Efisien
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100	100	100,00	0,-	0,-	0	
TOTAL					0,-	0,-	0	

Berdasarkan capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator Rata-rata Nilai SKM pada aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 91,74 dari target 88,38 atau mencapai 103,80 persen, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan serta mampu meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan tersebut, Inspektorat juga mengembangkan Aplikasi SIPELARI sebagai sarana pelayanan permohonan revidi oleh perangkat daerah secara elektronik, sehingga proses pelayanan menjadi lebih efektif, transparan, dan terukur. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dalam mendukung capaian indikator tersebut tidak menggunakan alokasi anggaran, sehingga peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia.



3.11 Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah Tahun 2025

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup perangkat daerah dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Penilaian ini mencakup beberapa aspek pelayanan seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, serta standar pelayanan.

Hasil nilai SKM digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perangkat daerah untuk mengetahui kualitas pelayanan yang telah diberikan serta sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ltda dapat dilihat pada gambar infografis 3.20 sebagai berikut:

Gambar 3.20

Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah)



Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, indikator yang diukur menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 3,64 dari target 3,54 atau mencapai 102,94%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan telah berjalan dengan baik serta mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Hasil ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang



diberikan juga semakin baik. Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah di bawah ini.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah pada Penilaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah

Capaian kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Perangkat Daerah pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Dari target nilai sebesar 3,54, realisasi yang dicapai adalah 3,64 atau sebesar 102,94%, sehingga berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Penilaian SKM tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, yang menilai kualitas pelayanan publik berdasarkan 9 unsur pelayanan, yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah telah berjalan dengan baik serta mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga mengalami peningkatan.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Tahun 2025
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%) TAHUN 2025
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	3,54	3,64	102,94

Sumber : Hasil Laporan SKM Inspektorat, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Perangkat Daerah, pada Tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 3,64 dari target 3,54 atau mencapai 102,94 persen.



Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi nilai SKM tercatat sebesar 3,54 dengan capaian 104,12 persen. Secara nilai realisasi terjadi peningkatan sebesar 0,10, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, dari sisi persentase capaian kinerja terjadi penurunan sebesar 0,011, yang disebabkan oleh perbedaan perbandingan antara target dan realisasi pada masing-masing tahun. Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah tetap berada pada kategori baik serta terus mengalami perbaikan dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Berikut Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah disajikan pada tabel 3.24 berikut ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	3,54	3,64	2,82	Capaian Meningkat

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2025–2026, indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang baik. Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,54 sedangkan realisasi yang dicapai adalah 3,64 atau mencapai 102,94 persen dari target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra yang ditetapkan pada Tahun 2026 sebesar 3,59, maka capaian kinerja Tahun 2025 telah mencapai 101,34 persen dari target Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada perangkat daerah telah melampaui target yang direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis serta mencerminkan adanya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap



pelayanan yang diberikan. Adapun sandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra Tahun 2025-2026 disajikan sebagaimana pada tabel 3.21 berikut ini :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR KINERJA RENSTRA	CAPAIAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	3,64	102,94	3,59	101,34

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut tidak dipublikasikan mengenai hasil rata-rata nasional untuk Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah khususnya di tahun 2025.

E. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah

Capaian kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkup Perangkat Daerah pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan realisasi sebesar 3,64 dari target 3,54 atau mencapai 102,94 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah telah berjalan dengan baik serta mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Peningkatan nilai SKM juga mencerminkan adanya perbaikan dalam proses pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penilaian SKM dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, yang menilai kualitas pelayanan berdasarkan beberapa unsur pelayanan seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, serta sarana dan prasarana pelayanan.



Faktor Pendukung:

1. Adanya komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Penerapan standar pelayanan yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas proses pelayanan.
4. Pelaksanaan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkala.

Faktor Penghambat:

1. Perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas petugas pelayanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pada beberapa pelayanan.
3. Perlunya peningkatan konsistensi dalam penerapan standar pelayanan pada seluruh perangkat daerah.

F. Program Pendukung Capaian Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis kelima Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah yang didukung dengan 2 (dua) indikator yang salah satunya yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah yang ketercapaiannya didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah yaitu sebesar 102,94 persen yang menyimpulkan bahwa Capaian kinerja tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.21:



Gambar 3.21
Pendukung Capaian Kinerja
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah



G. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah telah mencapai 83,49 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 16,51 persen atau setara dengan Rp668.886.306,-. Berikut disampaikan pada tabel 3.22 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

Tabel 3.22
Dukungan dan Efisiensi Anggaran
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	87,11	89,53	102,77	2.557.014.821,-	2.355.594.643,-	92,12	Efisien
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88,75	92,17	103,85	720.302.900,-	422.471.000,-	58,65	
	Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	88,38	91,74	103,80	776.055.400,-	606.421.172,-	78,14	
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88,38	90,44	102,33	0,-	0,-	0	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100,00	720.302.900,-	422.471.000,-	58,65	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100	100	100,00	776.055.400,-	606.421.172,-	78,14	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	100	100	100,00	726.178.900,-	721.440.300,-	99,34	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	persen	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100,00	616.198.222,-	554.169.280,-	89,93	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik	100	100	100,00	1.214.637.699,-	1.079.985.063,-	88,91	
TOTAL					4.053.373.121,-	3.384.486.815,-	83,49	

Berdasarkan capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, seluruh indikator yang terkait dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan hasil yang baik dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana dan Prasarana mencapai realisasi 89,53 dari target 87,11 atau sebesar 102,77 persen. Selanjutnya, Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Kualitas SDM mencapai 92,17 dari target 88,75 atau sebesar 103,85 persen.

Selain itu, indikator Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan juga menunjukkan capaian yang baik dengan realisasi 91,74 dari target 88,38 atau sebesar 103,80 persen. Sementara itu, Rata-rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan mencapai 90,44 dari target 88,38 atau sebesar 102,33 persen.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada perangkat daerah telah berjalan dengan baik serta mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan mekanisme pelayanan dan penanganan pengaduan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



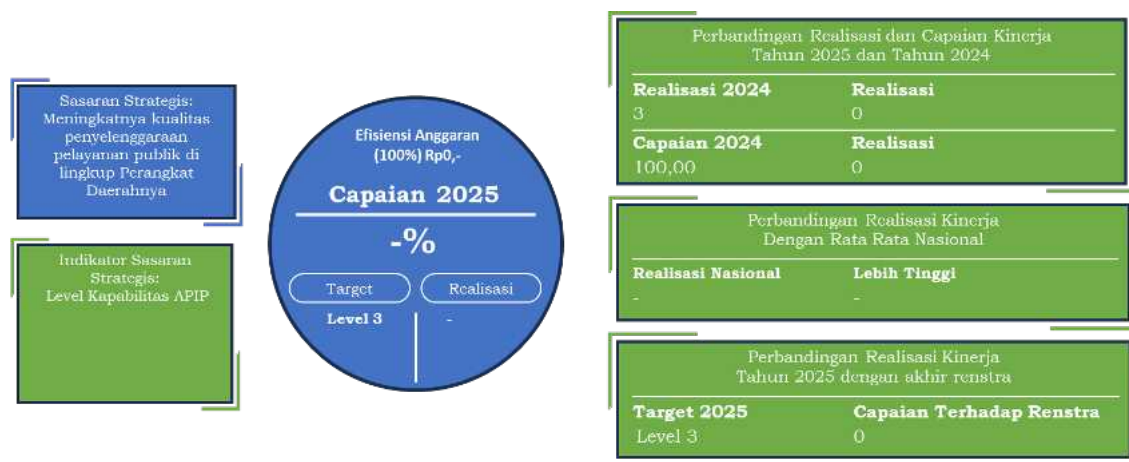
3.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP Tahun 2025

Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemampuan dan kematangan fungsi pengawasan internal pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan profesional. Penilaian ini menggambarkan sejauh mana APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai terhadap tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern pada perangkat daerah.

Semakin tinggi level kapabilitas APIP yang dicapai, maka menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan lebih efektif, sistematis, dan mampu memberikan nilai tambah dalam mendukung peningkatan akuntabilitas serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Capaian Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP dapat dilihat pada gambar infografis 3.22 sebagai berikut:

Gambar 3.22

Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan Dengan Tahun 2024, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra Dan Perbandingan Dengan Nasional (Level Kapabilitas APIP)



Berdasarkan indikator Level Kapabilitas APIP, target kinerja Tahun 2025 ditetapkan pada Level 3. Namun demikian, realisasi capaian pada tahun tersebut belum dapat ditampilkan atau diukur, karena proses penilaian kapabilitas APIP masih dalam tahap evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sampai dengan bulan Februari 2025, proses penilaian masih berlangsung sehingga hasil penilaian resmi belum diterbitkan. Oleh karena itu, capaian kinerja indikator Level Kapabilitas APIP Tahun 2025 belum dapat disimpulkan dan akan diketahui



setelah proses penilaian oleh BPKP selesai dilaksanakan. Berikut beberapa penjelasan secara terperinci pad Level Kapabilitas APIP di bawah ini.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025 Level Kapabilitas APIP pada Penilaian Level Kapabilitas APIP.

Capaian kinerja Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Tahun 2025 ditargetkan berada pada Level 3, yang menggambarkan bahwa fungsi pengawasan internal diharapkan telah dilaksanakan secara lebih terstruktur, berbasis risiko, serta mampu memberikan nilai tambah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan daerah.

Namun demikian, realisasi capaian kinerja Tahun 2025 belum dapat ditampilkan, karena hingga bulan Februari 2025 proses penilaian kapabilitas APIP masih dalam tahap evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Oleh karena itu, capaian kinerja indikator ini belum dapat diukur dan akan diketahui setelah proses penilaian dan verifikasi oleh BPKP selesai dilaksanakan.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Tahun 2025
Level Kapabilitas APIP

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%) TAHUN 2024
1	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3 (3.00)	-	0

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah, Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 Level Kapabilitas APIP.

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pada Tahun 2024 realisasi yang dicapai berada pada Level 3 dengan capaian 100,00% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada Tahun 2025 realisasi capaian kinerja belum dapat ditampilkan, karena hingga bulan Februari 2025 proses penilaian Level Kapabilitas APIP masih dalam tahap evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Oleh karena itu, capaian kinerja Tahun 2025 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian Tahun 2024 dan akan diketahui setelah proses penilaian oleh BPKP selesai dilaksanakan. Adapun Sandingan antara realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada Level Kapabilitas APIP disajikan pada tabel 3.16 berikut ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024
Level Kapabilitas APIP

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA		PENINGKATAN KINERJA	KETERANGAN
		TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	Level Kapabilitas APIP	100	-	-	-

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

C. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Akhir Renstra Level Kapabilitas APIP.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2025–2026, indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ditargetkan mencapai Level 3. Target tersebut juga menjadi target akhir yang direncanakan dalam dokumen Renstra pada Tahun 2026.

Namun demikian, realisasi capaian kinerja Tahun 2025 belum dapat ditampilkan, karena proses penilaian Level Kapabilitas APIP masih dalam tahap evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hingga saat ini hasil penilaian resmi belum diterbitkan, sehingga capaian terhadap target Renstra belum dapat diukur dan akan diketahui setelah proses penilaian oleh BPKP selesai dilaksanakan.

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra
Level Kapabilitas APIP

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA	CAPAIAN TAHUN	TARGET AKHIR KINERJA	CAPAIAN TARGET AKHIR
		TAHUN 2025	2025 (%)	RENSTRA	RENSTRA (%)
1	Level Kapabilitas APIP	-	-	3.00	-

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025



D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional belum dapat disandingkan dikarenakan indikator tersebut belum dipublikasikan oleh BPKP karena masih dalam tahapan evaluasi sehingga mengenai hasil rata-rata nasional untuk Level Kapabilitas APIP di tahun 2025 belum tersedia.

E. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Level Kapabilitas APIP.

Capaian kinerja Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Tahun 2025 belum dapat ditetapkan secara resmi karena hingga saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Oleh karena itu, analisis capaian kinerja pada tahun berjalan masih mengacu pada hasil penilaian Tahun 2024, dimana Inspektorat telah berhasil mencapai Level 3 dengan nilai 3,296.

Pencapaian Level 3 tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan secara lebih terstruktur dan mampu memberikan keyakinan yang memadai terhadap tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern pada perangkat daerah. Dengan capaian tersebut, APIP telah berperan dalam memberikan nilai tambah melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan konsultasi kepada perangkat daerah.

Faktor Pendukung:

1. Adanya komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat peran APIP sebagai pengawas internal pemerintah.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Penerapan pengawasan berbasis risiko dalam pelaksanaan tugas APIP.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia APIP melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia auditor dibandingkan dengan ruang lingkup pengawasan.



2. Perlunya peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kapabilitas APIP.
3. Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Berikut disampaikan peningkatan dari tahun sebelumnya berdasarkan tabel 3.26 Perbandingan Nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPKP di bawah ini.

Tabel 3.26
Perbandingan Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

NO	ELEMEN	NILAI EVALUASI		DEVIASI
		2024	2025	
Komponen				
1	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	0.720	-	-
2	Praktik Profesional	0.720	-	-
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0.240	-	-
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0.240	-	-
5	Struktur Tata Kelola	0.480	-	-
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)				
6	Peran dan Layanan	1.600	-	-
Simpulan Entitas		4.000	-	-

Sumber : Hasil Olahan Inspektorat Daerah Kota Bogor, Tahun 2025

F. Program Pendukung Capaian Kinerja Level Kapabilitas APIP.

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis kelima Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah yang didukung dengan 2 (dua) indikator yang salah satunya yaitu Level Kapabilitas APIP yang ketercapaiannya didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah untuk tahun 2025 belum dapat ditampilkan dikarenakan masih dalam tahap evaluasi sampai dengan bulan februari, sehingga belum dapat menyimpulkan capaian kinerja tersebut sudah mencapai target atau belum untuk tahun 2025 maupun target akhir renstra 2025-2026. Berikut disampaikan pada gambar 3.23



Gambar 3.23
Pendukung Capaian Kinerja
Level Kapabilitas APIP



G. Efisiensi Anggaran

Dalam realisasi anggaran tentu didukung oleh kinerja yang dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Bogor selama Tahun 2025 dengan dukungan dari pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan dan efisiensi anggaran program Tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian Level Kapabilitas APIP telah tercapai 58,65 persen dengan efisiensi sebesar 41,35 persen atau setara dengan Rp297.831.900,00,-. Berikut disampaikan pada tabel 3.27 mengenai dukungan program terhadap capaian Indikator Kinerja Utama dibawah ini :

Tabel 3.27
Dukungan dan Efisiensi Program Anggaran Level Kapabilitas APIP

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88,75	92,17	103,85	720.302.900,-	422.471.000,-	58,65	Efisien



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Bogor

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	KET
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	100.00	100.00	100.00	720.302.900,-	422.471.000,-	58,65	Efisien
TOTAL					720.302.900,-	422.471.000,-	58,65	

Berdasarkan capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada aspek pemenuhan kualitas SDM menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target nilai sebesar 88,75, realisasi yang dicapai adalah 92,17 atau sebesar 103,85 persen, sehingga berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan telah berjalan dengan baik serta mampu memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan kinerja aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Dari sisi anggaran, alokasi sebesar Rp720.302.900,- terealisasi sebesar Rp422.471.000,- atau 58,65 persen, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efisien dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui pemenuhan kualitas sumber daya manusia pada perangkat daerah. Efisiensi anggaran capaian sasaran strategis di atas sebesar 72,80 persen atau efisiensi sebesar Rp 201.757.000. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp 741.740.000 dan terealisasi sebesar Rp 539.983.000

3.13 Upaya Perbaikan dan Rencana Aksi Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor

Untuk Tahun 2025 telah terjadi peningkatan nilai, namun perlu dilakukan perbaikan agar tercapainya target maupun sebagai bahan evaluasi dalam penetapan target dimasa yang akan datang, berikut beberapa perbaikan yang perlu dilaksanakan sesuai rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dapat dilihat pada gambar 3.24 berikut:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>



Gambar 3.32
Upaya Perbaikan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor



Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja serta memperkuat peran pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Daerah Kota Bogor terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan rencana aksi strategis sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja organisasi. Upaya perbaikan ini difokuskan pada penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas pengawasan internal, penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Langkah perbaikan tersebut juga diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja dapat berjalan secara lebih terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Upaya Perbaikan dan Rencana Aksi

- ## 1. Reviu dan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja

Melakukan reviu dokumen perencanaan kinerja secara berkala agar selaras dengan sasaran strategis daerah serta memastikan indikator kinerja yang digunakan lebih terukur dan berorientasi pada hasil.

- ## 2. Penyempurnaan Perjanjian Kinerja

Melakukan penajaman perjanjian kinerja pada setiap level organisasi sehingga terdapat keterkaitan yang jelas antara tujuan strategis, sasaran kinerja, dan indikator kinerja.

- ### 3. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Secara Berkala



Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala guna memastikan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Penguatan Peran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Memastikan bahwa IKU menjadi dasar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga seluruh aktivitas organisasi berorientasi pada pencapaian sasaran strategis.

5. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja

Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

6. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja agar lebih informatif, berbasis data, serta mampu menggambarkan hubungan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja.

7. Pemanfaatan Informasi Kinerja dalam Pengambilan Kebijakan

Mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan strategis serta penyusunan kebijakan organisasi.

8. Peningkatan Kualitas Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi AKIP pada perangkat daerah agar mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.

9. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Melakukan penguatan kompetensi APIP melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pengembangan kapasitas dalam bidang pengawasan, evaluasi kinerja, serta manajemen risiko.

10. Penguatan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP dan Pengawasan

Mendorong perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP dan pengawasan secara konsisten sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik serta mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Sebagian besar indikator kinerja yang ditetapkan dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah direncanakan, khususnya pada aspek pengawasan internal, akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah berjalan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi, serta pendampingan kepada perangkat daerah, Inspektorat Daerah turut berkontribusi dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendorong peningkatan kualitas manajemen kinerja perangkat daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adanya perubahan metode penilaian pada beberapa indikator, keterbatasan informasi dan data pendukung, serta proses evaluasi eksternal yang masih berlangsung. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi Inspektorat Daerah untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan ke depan.

Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengawasan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, Inspektorat Daerah juga akan terus mendorong peningkatan akuntabilitas



kinerja perangkat daerah serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dengan berbagai capaian dan upaya perbaikan yang telah dilakukan, diharapkan Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal serta memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

